

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, LUAS WILAYAH, SISA
LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PERTUMBUHAN
INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL**

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara)

Oleh :

FIRDHA CHAIRAMA

NIM : 0502162107

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, LUAS WILAYAH, SISA
LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PERTUMBUHAN
INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL**

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara)

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Dalam Ilmu Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

FIRDHA CHAIRAMA

NIM : 0502162107

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Firdha Chairama**
Nim : 0502162107
Tempat/Tgl Lahir : Candirejo/ 28 Agustus 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun I Rahayu Desa Ajibaho Kecamatan Biru-biru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul : **“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, LUAS WILAYAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PERTUMBUHAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Biru-biru, 20 Oktober 2020

Yang membuat Pernyataan



Firdha Chairama

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, LUAS WILAYAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PERTUMBUHAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara)” an. Firdha Chairama, NIM 0502162107 Jurusan Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 22 Januari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah.

Medan, 22 Januari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Jurusan Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A
NIDN:2001077903

Sekretaris



Kusmilawaty, M. Ak
NIDN: 2014068001

Anggota



1. Yusrizal, SE, M.Si
NIDN:2022057501



2. Rahmat Dain Harahap, M. Ak.
NIDN: 0126099001



3. Dr. Sugianto, MA
NIDN:2007066701



3. Laylan Syafina, SE, M.Si
NIDN:2027089103

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis islam
UIN-SU Medan

Dr. H. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIDN:2023047602

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, LUAS WILAYAH, SISA
LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PERTUMBUHAN
INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara)**

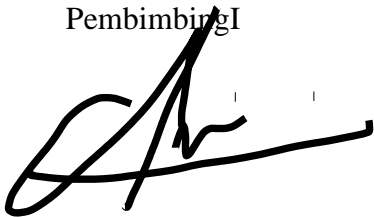
Oleh :

Firdha Chairama

Nim : 0502162107

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah
Medan, Oktober 2020

Pembimbing I



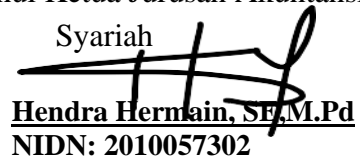
Yusrizal, SE, M.Si
NIDN: 2022057501

Pembimbing II



Rahmat Daim Harahan, S.Ei., M.Ak.
NIDN: 0126099001

Mengetahui Ketua Jurusan Akuntansi
Syariah



Hendra Hermain, SE, M.Pd
NIDN: 2010057302

ABSTRAK

Firdha Chairama. Nim: 0502162107, Judul Skripsi :“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara)”. Dengan Pembimbing Skripsi I Oleh Bapak Yusrizal, M.Si Dan Pembimbing Skripsi II Oleh Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan apakah terdapat Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD, Data Luas Wilayah dan Data Panjang Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2019. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi data panel dan uji hipotesis dengan menggunakan software *Eviews 10*. Dan sampel pada penelitian ini adalah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, yaitu 16 Kabupaten dan 7 Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil pengujian secara parsial antara desentralisasi fiskal, luas wilayah, dan pertumbuhan infrastruktur jalan terhadap alokasi belanja modal dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial antara SiLPA terhadap alokasi belanja modal dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Dan berdasarkan hasil uji simultan antara variabel desentralisasi fiskal, luas wilayah, SiLPA, dan pertumbuhan infrastruktur jalan terhadap alokasi belanja modal dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap alokasi belanja modal.

Kata Kunci : Alokasi Belanja Modal, Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, SiLPA, Pertumbuhan Infrastruktur Jalan.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kasih sayang dan hidayahNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara)”**. Serta tak lupa sholawat beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan alam Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhisyarat penyelesaian studi pendidikan strata satu (S1), Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada Mamah tercinta Sri Irmawati, penulis mengucapkan terimakasih atas pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan, memberikan doa, cinta, kasih sayang, nasihat dan semangat serta dukungan yang tak ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam berbagai hal terkhusus untuk penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada Abang tersayang Mashyuri Prakarsa, Adik tersayang Fedro Ferdio Ilyas dan Sahabatku Suria Suchi Dwi Putri penulis ucapkan terimakasih karena sudah banyak membantu, memberi semangat dan tidak pernah bosan untuk mendengar keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Yusrizal, M.Si selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak. selaku Pembimbing Skripsi II ditengah-tengah kesibukannya telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan selalu mampu memberikan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Prof. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr.H.Muhammad Yafiz,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
6. Ibu Dr.Hj.Yenni Samri Juliati Nst, M.A selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Hendra Hermain, SE,M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah yang telah menyusun jadwal dan menghubungi mahasiswa akuntansi syariah.
8. Segenap Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Kepada Leny Dahliana Saragih penulis ucapkan terimakasih karena sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan AKS-A 2016 .
11. Dan semua pihak yang telah berkenan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari akan kekurang sempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, segala kritik maupun saran sangat penulis harapkan dan penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Biru-biru, 20 Oktober 2020

Penulis,

Firdha Chairama

Nim: 0502162107

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah.....	13
D. Perumusan Masalah	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengeluaran Pemerintah.....	16
B. Alokasi Belanja Modal.....	21
C. Desentralisasi Fiskal.....	27
D. Luas Wilayah	33
E. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....	35
F. Pertumbuhan Infrastruktur Jalan	38
G. Penelitian Sebelumnya	41
H. Kerangka Konseptual	43
I. Hipotesis.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	50

B. Waktu Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel	51
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel	54
G. Teknik Analisa Data	56

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian	64
1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara	64
2. Deskripsi Data	66
B. Uji Pemilihan Model	74
1. Uji Chow	74
2. Uji Hausman	76
C. Asumsi Klasik	78
1. Uji Autokorelasi	78
2. Uji Heteroskedastisitas	78
3. Uji Multikolinearitas	79
D. Analisis Regresi Panel	79
E. Uji Hipotesis	81
1. Uji t	81
2. Uji F	83
3. Uji R ²	83
F. Interpretasi Hasil Penelitian	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Luas Wilayah dan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019.....	5
Tabel 1.2	Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019.....	8
Tabel 1.3	Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019.....	9
Tabel 1.4	Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan Di Provinsi Sumatera Utara.....	11
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Sebelumnya.....	42
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	52
Tabel 3.2	Penentuan Sampel.....	53
Tabel 3.3	Variabel Dependen dan Variabel Independen.....	56
Tabel 4.1	Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	65
Tabel 4.2	Alokasi Belanja Modal Tahun 2015-2019.....	67
Tabel 4.3	Desentralisasi Fiskal Tahun 2015-2019.....	68
Tabel 4.4	Luas Wilayah Tahun 2015-2019.....	69
Tabel 4.5	Rasio Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015-2019.....	70
Tabel 4.6	Pertumbuhan Infrastruktur Jalan Tahun 2015-2019.....	71
Tabel 4.7	Analisis Deskriptif Statistik.....	72
Tabel 4.8	Common Effect Model.....	74
Tabel 4.9	Fixed Effect Model.....	74
Tabel 4.10	Hasil Uji Chow.....	75
Tabel 4.11	Random Effect Model	76
Tabel 4.12	Hasil uji Hausman.....	77
Tabel 4.13	Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin Watson.....	78

Tabel 4.14	Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Breusch-Pagan	78
Tabel 4.15	Uji Multikolinearitas dengan VIF.....	79
Tabel 4.16	Random Effect model.....	80
Tabel 4.17	Uji t (Uji Parsial).....	81
Tabel 4.18	Uji F (Uji Simultan).....	83
Tabel 4.19	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rata-Rata Belanja Modal Pada 23 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019 (%).....	4
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat .dengan itu pemerintah daerah dapat dengan mudah mengatur segala kas milik daerah yang dipergunakan dalam pelayanan publik di daerah.

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan kualitas pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat, tersedianya layanan umum dan layanan sosial yang cukup dan berkualitas, perbaikan dan penyediaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, penambahan perbaikan di bidang infrastruktur, bangunan, peralatan dan harta tetap lainnya

Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin, dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software dan sebagainya. Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.¹ Belanja Modal memiliki

¹Kusnandar dan Dodik Siswantoro, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal", (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012), h.2.

peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan layanan publik.²

Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, karena dengan adanya peningkatan dalam layanan disektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya didaerah.

Desentralisasi fiskal didefenisikan sebagai penyerahan sebagian dari tanggung jawab fiskal atau keuangan negara dari pemerintah pusat kepada jenjang pemerintahan di bawahnya (provinsi, kabupaten atau kota). Gagasan desentralisasi fiskal ialah penyerahan beban tugas pembangunan, penyediaan layanan publik dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga tugas-tugas itu akan lebih dekat ke masyarakat. Dengan begitu , kemampuan pemerintah daerah akan dapat ditingkatkan dan pertanggungjawaban akan dapat lebih terjamin.³

Maka dari itu, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.⁴ Dan pengalokasian belanja modal yang baik merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi Desentralisasi Fiskal.⁵ Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah

²Ferdian Putra, “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal,” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2017) h.1.

³Wahyudi Kumorotomo, *Desentralisasi Fiskal: Politik Dan Perubahan Kebijakan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) h. 1-6.

⁴ *Ibid.*, h. 2.

⁵ Robin Keswando, *et. al.*, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Luas Wilayah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Studi Empiris Di Provinsi Jawa Timur” dalam *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 12 No. 1, Maret 2016, h. 1.

serta meningkatkan kemandirian daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri tanpa perlu terlalu bergantung pada pemerintah pusat.⁶Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini adalah proksi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah.

Namun kenyataannya, permasalahan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tentang penyerapan anggaran yaitu pemerintah kabupaten/kota masih lebih banyak menggunakan pendapatan daerahnya untuk keperluan belanja operasi yang bisa dikatakan kurang produktif daripada digunakan untuk belanja modal telah menjadi fenomena bagi pemerintah daerah baik pusat maupun daerah. Dan lambatnya penyerapan anggaran ini mengakibatkan anggaran menumpuk diakhir-akhir tahun dan tidak optimalnya alokasi belanja modal pada APBD.Ditengah target pembangunan yang cukup tinggi, alokasi belanja modal yang digelontorkan pemerintah tergolong masih cukup rendah.⁷Alokasi belanja modal pada APBD yang relatif kecil nilainya karena terlalu besarnya porsi belanja pegawai pada APBD menjadi kendala bagi kabupaten/kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, belanja modal menjadi tidak produktif. Kondisi tersebut membuat implementasi desentralisasi fiskal belum sesuai dengan yang diharapkan.⁸

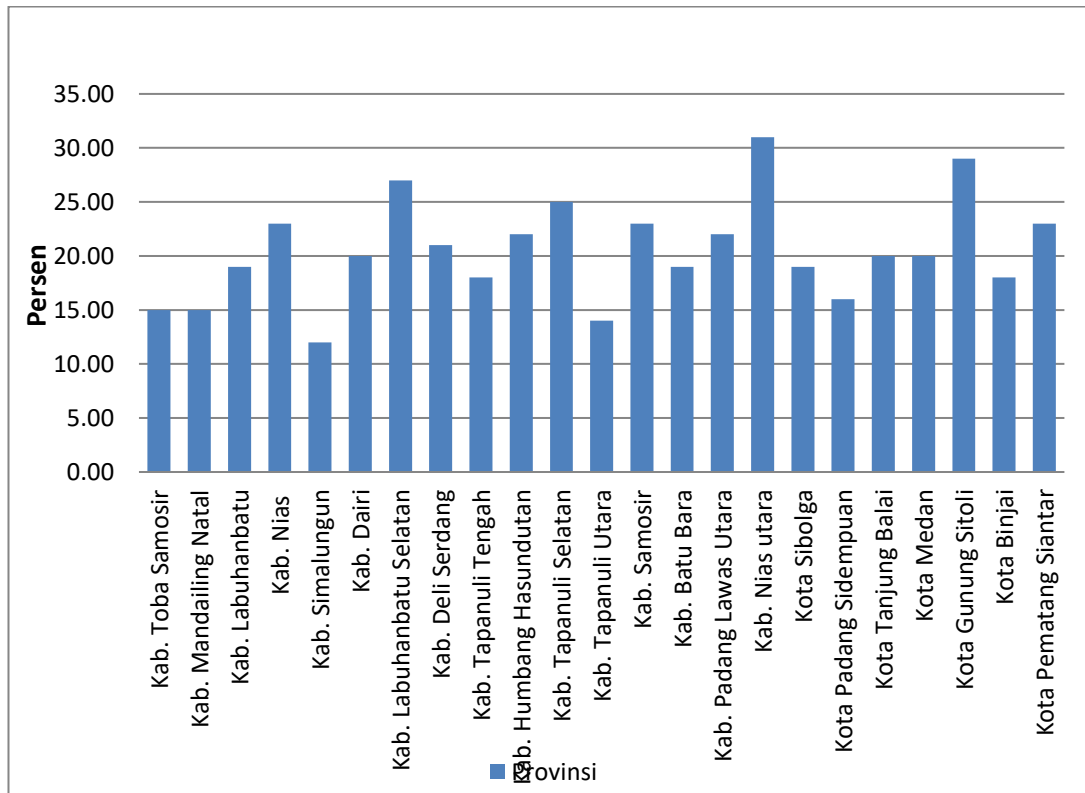
Berdasarkan pengamatan pada Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 diperoleh data seperti berikut :

⁶Mayang Sari Nasution, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal”, (Skripsi, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2018), h. 5.

⁷Bisnis.com, “TREN APBN: Alokasi Belanja Modal Rendah”, <https://m.bisnis.com/read/20190617/10/934374/tren-apbn-alokasi-belanja-modal-rendah>. Diakses pada 17 Januari 2020.

⁸*Ibid.*, h. 17-18.

Gambar 1.1
Rata-Rata Belanja Modal Pada 23 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2015-2019 (%)



Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa belanja Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2019 menunjukkan rata-rata setiap tahunnya belanja modal dibawah 30%, yaitu lebih rendah daripada belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Hal ini belum memenuhi target dalam RPJMN tahun 2015-2019 dimana secara keseluruhan belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya adalah 30% dari belanja daerah.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal diantaranya yaitu Luas Wilayah. Luas wilayah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional kecil. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan

daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.⁹ Dan daerah yang mempunyai wilayah yang cukup luas hal itu justru akan memakan biaya pembangunan yang cukup besar. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup besar jika ingin daerah tersebut benar-benar maju dan sejahtera.¹⁰

Namun kenyataannya, pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara daerah yang lebih luas belum tentu memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama dengan daerah yang lebih kecil. Masih banyak daerah-daerah yang memiliki luas wilayah yang cukup besar, akan tetapi daerah tersebut terdapat lebih banyak daerah pertanian apabila dibandingkan dengan daerah pemerintahannya, seperti pusat kota dll. Sebaliknya, banyak juga terdapat daerah yang cenderung lebih sempit luas wilayahnya, akan tetapi daerah tersebut kebanyakan didominasi oleh pusat kota dan pemerintahan yang tentunya akan membutuhkan lebih banyak belanja modal untuk mendanai daerah tersebut. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Data Luas Wilayah dan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km2)	Rata-Rata Belanja Modal
Kab. Toba Samosir	2,328.89	656,970,357,995
Kab. Mandailing Natal	6,134.00	955,885,726,299
Kab. Labuhanbatu	2,156.02	792,245,399,327
Kab. Nias	1,842.51	529,749,145,496
Kab. Simalungun	4,369.00	1,416,012,583,898
Kab. Dairi	1,927.80	697,710,757,435
Kab. Labuhanbatu Selatan	3,596.00	552,632,012,041
Kab. Deli Serdang	2,241.68	2,164,653,982,509
Kab. Tapanuli Tengah	2,188.00	703,596,687,471

⁹Kusnandar dan Dodik Siswanto, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal" (Skripsi Universitas Indonesia, 2012), h. 4

¹⁰ Putra, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal," h. 3.

Kab. Humbang Hasundutan	2,335.33	589,704,647,255
Kab. Tapanuli Selatan	6,030.47	797,739,258,677
Kab. Tapanuli Utara	3,791.00	774,993,759,842
Kab. Samosir	2,069.05	511,627,583,339
Kab. Batu Bara	922.20	658,041,665,168
Kab. Padang Lawas Utara	3,918.05	699,195,793,077
Kab. Nias utara	1,202.78	461,964,023,826
Kota Sibolga	41.31	381,206,302,913
Kota Padang Sidempuan	114.66	507,378,661,604
Kota Tanjung Balai	107.83	433,026,819,001
Kota Medan	265.00	2,951,115,041,261
Kota Gunung Sitoli	280.78	476,634,145,966
Kota Binjai	59.19	530,788,831,327
Kota Pematang Siantar	55.66	599,869,996,423

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dan www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Tabel 1.1 dapat menunjukkan kabupaten Mandailing Natal belanja modalnya lebih kecil daripada kabupaten Deli Serdang, padahal jika dilihat dari luas wilayahnya Mandailing Natal memiliki luas yg lebih luas daripada luas kabupaten Deli Serdang. Dan juga belanja modal kota Binjai lebih besar dibandingkan dengan belanja modal kota Gunung Sitoli yang apabila dilihat dari luas wilayahnya kota Gunung Sitoli jauh lebih luas daripada kota Binjai. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya ketidaksesuaian antara teori yang mengatakan bahwa daerah yang mempunyai wilayah yang cukup luas akan memakan biaya pembangunan yang cukup besar dengan kenyataan yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Faktor lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Ardhani pada tahun 2011 besar kecilnya SiLPA tergantung tingkat belanja yang dilakukan pemda serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah maka

¹¹*Ibid.*,

dimungkinkan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Namun sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka akan diperoleh SiLPA yang kecil. Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Semakin besar SiLPA yang dihasilkan daerah maka alokasi belanja modal akan semakin tinggi. Semakin baik pengelolaan dan tingginya belanja suatu daerah maka SiLPA yang dihasilkan juga semakin kecil.

Besarnya porsi SiLPA tahun lalu dalam struktur penerimaan pembiayaan dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja tahun berikutnya.¹² SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif dibidang perencanaan dan pengelolaan dana.¹³

Namun, kenyataan yang terjadi pada beberapa daerah di Kabupaten /Kota Di Provinsi Sumatera Utara adalah meningkatnya belanja modal dibarengi dengan meningkatnya SiLPA. Padahal seharusnya dengan meningkatnya belanja modal akan membuat SiLPA semakin sedikit. Seperti yang dapat dilihat pada tabel Realisasi Belanja modal dan Realisasi SiLPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara lima tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 berikut ini :

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Modal
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	BELANJA MODAL				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Toba Samosir	955,279,069	1,000,908,609	1,100,661,584,284	1,055,027,173,780	1,127,206,844,231
Kab. Mandailing Natal	1,365,524,435	1,588,762,382	1,561,204,713,766	1,506,945,739,448	1,708,323,891,466
Kab. Labuhanbatu	1,062,540,861	1,276,690,077	1,259,797,171,354	1,150,307,799,141	1,548,782,795,200
Kab. Nias	789,785,824	898,819,234	881,983,873,162	930,217,782,108	834,855,467,151
Kab. Simalungun				2,269,698,962,408	2,423,685,403,258

¹²*Ibid.*, h. 18.

¹³Ardhini dan Handayani, “*Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Keagenan,*” dalam Ferdian Putra, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal,* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2017), h.4.

	1,938,855,538	2,358,581,019	2,382,381,117,269		
Kab. Dairi	965,534,140	1,116,793,269	1,146,806,000,882	1,146,806,000,882	1,192,859,458,000
Kab. Labuhanbatu Selatan	826,956,634	895,434,495	900,442,780,998	870,934,573,887	990,060,314,190
Kab. Deli Serdang	2,901,970,267	3,538,303,239	3,377,738,242,085	3,422,610,573,015	4,016,480,823,937
Kab. Tapanuli Tengah	1,065,509,039	1,195,876,244	1,120,351,198,333	1,150,971,725,737	1,244,399,128,000
Kab. Humbang Hasundutan	899,990,938	984,718,661	959,187,459,359	918,952,770,451	1,068,498,296,865
Kab. Tapanuli Selatan	1,156,981,129	1,244,945,252	1,196,223,540,989	1,315,039,876,708	1,475,030,949,305
Kab. Tapanuli Utara	1,228,084,531	1,311,177,090	1,203,503,299,521	1,293,977,148,594	1,374,949,089,474
Kab. Samosir	848,772,661	910,073,968	864,087,171,199	803,883,721,733	888,408,177,133
Kab. Batu Bara	918,925,955	960,904,109	1,065,893,057,426	996,421,074,024	1,226,014,364,328
Kab. Padang Lawas Utara	803,099,941	1,115,416,292	1,185,284,306,868	1,081,855,421,645	1,226,920,720,637
Kab. Nias utara	686,045,781	810,630,276	722,898,158,998	745,799,698,074	839,625,586,000
Kota Sibolga	676,161,748	643,323,810	597,867,532,072	636,738,976,517	670,105,520,418
Kota Padang Sidempuan	843,296,841	777,000,607	833,862,860,721	821,661,404,531	879,748,745,321
Kota Tanjung Balai	573,499,069	723,336,004	644,010,084,265	657,820,622,732	862,006,552,935
Kota Medan	4,705,553,863	5,385,363,853	4,395,825,169,225	4,215,003,353,126	6,134,655,766,238
Kota Gunung Sitoli	714,804,376	772,170,728	778,005,373,505	702,837,581,848	900,840,799,374
Kota Binjai	938,018,114	1,027,217,336	849,614,204,509	934,603,498,530	867,761,218,147
Kota Pematang Siantar	971,658,119	1,054,992,391	934,471,598,873	994,512,015,481	1,068,339,717,250

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Tabel 1.3
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	SiLPA				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Toba Samosir	107,760,000,000	71,742,315,864	109,466,369,893	54,994,440,231	57,042,472,940
Kab. Mandailing Natal	115,691,000,000	81,023,734,262	13,000,000,000	10,003,415,645	26,425,237,255
Kab. Labuhanbatu	42,286,025,537	120,847,378,968	18,127,093,937	138,518,217,000	80,599,812,000
Kab. Nias	121,868,000,000	142,119,953,814	127,169,385,916	209,000,000,000	32,250,000,000
Kab. Simalungun	103,269,000,000	121,547,237,263	21,908,809,436	1,000,000,000	3,500,000,000
Kab. Dairi	94,271,905,688	141,523,424,284	141,523,424,284	40,000,000,000	45,000,000,000
Kab. Labuhanbatu Selatan	53,026,126,783	67,084,087,512	35,798,687,314	40,772,631,350	50,000,591,000
Kab. Deli Serdang	156,663,000,000	258,613,972,572	198,810,731,378	405,000,000,000	405,000,000,000
Kab. Tapanuli Tengah	93,198,802,569	68,928,299,109	38,653,948,010	15,422,000,000	25,629,980,000

Kab. Humbang Hasundutan	127,692,000,000	137,823,894,699	126,725,260,328	65,701,665,374	72,087,873,532
Kab. Tapanuli Selatan	36,168,214,005	54,766,368,715	40,755,368,007	30,222,110,544	54,199,745,993
Kab. Tapanuli Utara	119,290,000,000	55,710,584,792	60,633,554,852	45,859,030,605	25,734,325,326
Kab. Samosir	105,244,000,000	73,916,690,800	32,001,197,011	5,000,000,000	15,423,762,938
Kab. Batu Bara	124,893,000,000	89,829,016,945	86,190,309,300	95,740,834,935	30,500,000,000
Kab. Padang Lawas Utara	102,036,000,000	111,118,709,921	39,413,288,307	30,000,000,000	32,826,000,000
Kab. Nias utara	69,881,780,220	45,147,533,253	12,992,727,960	2,000,000,000	25,725,350,000
Kota Sibolga	81,182,196,224	22,791,904,871	34,027,054,886	1,151,639,045	5,000,000,000
Kota Padang Sidempuan	45,111,412,833	5,194,711,890	24,510,929,434	14,088,503,143	16,222,934,000
Kota Tanjung Balai	85,611,372,432	75,891,821,787	340,087,903,057	26,000,000,000	3,600,000,000
Kota Medan	252,576,000	35,461,191,560	43,701,504,536	35,881,742,000	100,000,000,000
Kota Gunung Sitoli	129,865,000,000	130,087,094,794	43,505,020,376	11,042,381,450	21,000,000,000
Kota Binjai	51,993,127,117	18,163,184,659	45,624,838,946	500,000,000	10,238,146,954
Kota Pematang Siantar	72,961,236,186	158,256,061,461	85,512,687,889	35,000,000,000	97,044,273,457

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa belanja modal kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dan juga penurunan setiap tahunnya. Sebagaimana data yang tercantum dalam tabel 1.2 dan 1.3 tersebut terdapat beberapa kasus dimana ketika SiLPA mengalami peningkatan, Belanja Modal justru malah mengalami peningkatan.

Satu lagi faktor lain untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah Infrastruktur. Infrastruktur merupakan roda penggerak kemajuan ekonomi dan pembangunan. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, imfrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Hal ini dilaksanakan dengan cara meningkatkan belanja langsung serta mengurangi belanja tidak langsung yang tidak berkontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Dan seharusnya belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan, yang justru perlu ditingkatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Namun ironisnya pengelolaan APBD di Provinsi Sumatera Utara masih belum efektif, seperti yang sudah dibahas pada halaman sebelumnya bahwa dalam mengalokasikan belanja modal pemerintah masih lebih banyak mengalokasikan ke belanja pegawai sehingga alokasinya terus meningkat, dan sebaliknya porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru menurun.¹⁴ Karena seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah harus mampu mengalokasikan belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan.

Meskipun demikian, infrastruktur jalan di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara masih harus lebih berbenah terutama mengenai infrastruktur ekonomi. Salah satunya kondisi jalan yang menjadi akses utama yang mungkin masih jauh dari kesan memadai. Pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara telah berlangsung cukup lama dengan biaya yang cukup besar serta memiliki kontribusi yang cukup besar juga untuk peningkatan pertumbuhan dan produktivitas perekonomian. Namun masih banyak masalah yang dihadapi, antara lain kualitas yang masih rendah, perawatan infrastruktur yang kurang memadai dan sebagainya. Berikut ini adalah tabel panjang jalan menurut kabupaten/kota dan kondisi jalan di Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 1.4
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan Di Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan					Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Tidak Dirinci	
Nias	1,00	10,00	1,00	0,30	-	12,30
Mandailing Natal	57,15	53,90	3,70	37,20	21,26	173,21
Tapanuli Selatan	59,37	35,85	1,40	16,50	-	113,12

¹⁴Guntur Hendriwiyanto, "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi," (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014), h.3.

Tapanuli Tengah	37,20	19,30	-	-	-	56,50
Tapanuli Utara	119,60	62,15	3,80	12,75	1,00	199,30
Toba Samosir	81,90	33,70	3,38	36,80	36,90	192,68
Labuhanbatu	42,85	72,80	0,45	6,40	19,00	141,50
Simalungun	49,36	168,30	1,10	1,00	-	219,76
D a i r i	13,95	58,85	1,20	7,50	-	81,50
Deli Serdang	77,08	66,29	1,50	2,00	-	146,87
Humbang Hasundutan	60,70	71,94	0,40	1,00	3,10	137,14
Samosir	6,40	16,90	2,40	44,20	4,55	74,45
Batu Bara	29,35	25,87	0,13	0,30	-	55,65
Padang Lawas Utara	47,05	43,10	2,90	25,05	10,40	128,50
Labuhanbatu Selatan	-	-	-	-	-	-
Nias Utara	46,75	30,80	5,50	25,75	9,80	118,60
S i b o l g a	0,10	3,96	-	-	-	4,06
Tanjungbalai	5,51	3,20	-	-	-	8,71
Pematangsiantar	5,97	7,35	-	-	-	13,32
M e d a n	21,15	15,10	0,40	0,90	-	37,55
B i n j a i	4,05	2,60	-	-	-	6,65
Padangsidempuan	11,70	12,90	0,60	-	7,00	32,20
Gunungsitoli	7,70	14,74	1,50	0,30	-	24,24
Sumatera Utara	785,79	756,8	31,36	217,95	113,01	1.977,81

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara (BPS Update Terakhir)

Jika dilihat dari tabel 1.4 panjang jalan menurut kabupaten/kota dan kondisi jalan pada Sumatera Utara diatas, kabupaten Tapanuli Utara menjadi daerah yang menjadi urutan pertama sebagai panjang jalan dengan kondisi baik yaitu 119,60 km. Sedangkan daerah samosir yang menjadi daerah yang paling banyak memiliki jalan dengan kondisi rusak berat yaitu 44,20 km.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdian Putra (2017) yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2014)” menyimpulkan bahwa

Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal, Sedangkan Luas Wilayah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Menurut Cahyani Nurlela dan Nur Hidayati (2018) pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur)” Secara simultan Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh secara signifikan pada Pengalokasian Belanja Modal, serta secara parsial Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Dan Rita Devi Setiyani (2015) menyimpulkan dari penelitian yang dilakukannya dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Studi Empiris Pada Kabupaten Di Karesidenan Pati Periode 2009-2013” menyimpulkan bahwa DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, PAD dan Luas Wilayah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, dan SiLPA tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas masih didapatkan perbedaan hasil antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk menguji lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul : “ **Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja pegawai yang kurang produktif daripada untuk belanja modal.
2. Implementasi desentralisasi fiskal belum sesuai dengan yang diharapkan karena alokasi belanja modal pada APBD yang relatif kecil nilainya karena terlalu besarnya porsi belanja pegawai pada APBD menjadi kendala bagi kabupaten/kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Adanya perbedaan antara teori dengan kenyataan yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Yaitu, tidak selalu daerah yang luas maka belanja modalnya besar dan daerah yang kecil belanja modalnya sedikit.
4. Adanya ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Dimana seharusnya jika semakin besar SiLPA maka semakin besar pula belanja modalnya. Tetapi kenyataannya pada Provinsi Sumatera Utara SiLPA yang tinggi tidak membuat belanja modalnya menjadi tinggi juga.
5. Masih tingginya angka jalan yang rusak berat pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
6. Adanya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan agar penelitian ini lebih terfokus, peneliti membatasi masalah hanya pada Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yaitu berupa pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan terhadap Pengalokasian

Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2019.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang hendak diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah SiLPA berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah Pertumbuhan Infrastruktur Jalan berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
5. Apakah Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan SiLPA secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui SiLPA berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

- d. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Infrastruktur Jalan berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- e. Untuk mengetahui apakah Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana akuntansi, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan serta melatih proses berpikir secara ilmiah khususnya dalam bidang pemerintah daerah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat dikembangkan oleh peneliti lain sebagai acuan referensi lebih lanjut maupun sebagai bahan teori untuk penelitian selanjutnya mengenai desentralisasi fiskal, luas wilayah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap alokasi belanja modal.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengeluaran Pemerintah

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Menurut Dumairy (1996:157), sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai segala kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan hanya untuk menjalankan roda pemerintahan saja melainkan juga untuk membiayai kegiatan perekonomian.

Kesejahteraan publik sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat. Negara, melalui belanja Negara/Pemerintah, dapat memicu aktivitas ekonomi di masyarakat. Belanja Negara dituangkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara).¹⁵

Menurut Noor (2015:252), APBN merupakan penjabaran rencana kerja para penyelenggara Negara untuk kurun waktu satu tahun. APBN dituangkan ke dalam suatu format yang memuat format pengelompokan jenis transaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan penelenggaraan Negara menurut pengaruhnya terhadap posisi keuangan Negara dalam kurun waktu satu tahun. APBN menjadi alat strategis pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi publik. Disatu sisi APBN berperan sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan Negara melalui pajak dan retribusi dari proses dan hasil aktivitas ekonomi di masyarakat, dandisisi lain APBN berperan sebagai alat untuk belanja Negara, yaitu alokasi pembelanjaan uang ke tengah masyarakat yang berasal dai pendapatan Negara. Melalui kedua peran ini, kecepatan dan ketepatan aktivitas ekonomi di masyarakat dapat didorong sehingga bisa diarahkan untuk bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

¹⁵Seri Jefri Adil Waruwu, “ Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995-2014”, (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma), h.66

Belanja pemerinatah adalah pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi pendanaan urusan pemerintahan, baik urusan wajib, pilihan, dan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu. Pengeluaran belanja ini dapat mendukung berbagai program dan kebijakan-kebijakan dalam stabilitas perekonomian nasional.¹⁶

2. Komponen Pengeluaran Pemerintah

Dalam neraca anggaran pendapatan dan belanja negara, pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas :¹⁷

a) Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin pada dasarnya berdasarkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain.

b) Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik.

Ada beberapa Komponen belanja pemerintah, yaitu:¹⁸

- a) Belanja langsung dapat dikelompokkan menjadi : belanja pegawai yang mengandung pengertian belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk upah, lembur dan pengeluaran lain pegawai. Belanja barang dan jasa juga merupakan belanja langsung yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun atau untuk pengeluaran pemakaian jasa untuk melakukan berbagai program. Belanja lain yang termasuk belanja langsung adalah barang modal yang merupakan belanja untuk meningkatkan

¹⁶*Ibid.*, h. 67

¹⁷*Ibid.*, h. 68

¹⁸*Ibid.*, h. 69

modal yang dapat menambah aset tetap bagi suatu negara dengan melakukan pemeliharaan untuk mempertahankan inventaris atau infrastruktur yang dimiliki suatu negara sehingga memberikan manfaat serta dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas aset negara.

- b) Belanja tidak langsung, meliputi :
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Bunga
 - 3) Belanja Subsidi
 - 4) Belanja Hibah
 - 5) Belanja Bantuan Sosial

Menurut Noor (2015:258), pengeluaran negara dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- a) Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah (Belanja rutin) adalah belanja kelompok konsumsi untuk biaya penyelenggaraan negara. Kelompok belanja konsumsi terdiri dari: 1) gaji dan upah para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga yang dikuasai negara) beserta birokrasinya (PNS, polisi, dan tentara) yang meliputi biaya perjalanan dinas di dalam maupun di luar negeri, 2) belanja pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang akan dipakai dalam pengoperasian negara (barang dan jasa yang habis dalam tahun anggaran yang bersangkutan), misalnya kertas, tinta, bakar, listrik, dan lain-lain.

- b) Investasi Negara yang Dilaksanakan Pemerintah

Investasi ini adalah belanja negara dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh negara, misalnya membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

- c) Pembayaran oleh Negara kepada Masyarakat

Pembayaran ini adalah dana dari negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan atau *transfer payment* yang dibayarkan oleh negara melalui pemerintah kepada masyarakat yang membuatnya. Pembayaran ini terlihat pada APBN dan akan menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat berikutnya.

3. Pengeluaran Pemerintah Dalam Perspektif Islam

Dalam mengalokasikan anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Prinsip Keadilan dapat dilihat pada Q.S Al-an'am : 152

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَأُنْكَفِيَنَّسًا الْأُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "... Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."¹⁹

Jika dikaitkan dengan anggaran makna dari ayat tersebut yaitu, dalam menyusun anggaran hendaklah dilakukan dengan adil dan tidak memihak pada siapapun, serta bertujuan untuk kepentingan bersama karena itu adalah perintah Allah yang harus kamu laksanakan dan kamu ingat.

¹⁹TafsirWeb, "Quran Surat Al-An'am Ayat 152", <https://tafsirweb.com/2276-surat-al-anam-ayat-152.html>. Diakses pada 24 Desember 2019 Pukul 17.10 WIB

Q.S Al-Furqaan (25) : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ

Artinya : “ *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.* ”²⁰

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan supaya dalam membelanjakan harta terutama dalam belanja modal agar tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit atau bisa dikatakan pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota tidak boleh kurang dan tidak boleh pula berlebihan.

Q.S Al-Hasyr (25) : 7

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

Artinya : “ ... *supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu..* ”²¹

Dari ayat diatas Allah memerintahkan supaya kekayaan dan sumber daya itu di distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan . untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung maupun regulasi. Bentuk intervensi langsung antara lain menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya dengan cara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.

²⁰TafsirWeb, “Quran Surat Al-Furqan Ayat 67”, <https://tafsirweb.com/6323-surat-al-furqan-ayat-67.html>. Diakses pada 24 Desember 2019 Pukul 16.34 WIB

²¹ TafsirWeb, “Quran Surat Al- Hasyr Ayat 7”, <https://tafsirweb.com/10805-quran-surat-al-hasyr-ayat-7.html>. Diakses pada 10 Juli 2020 Pukul 19.23 WIB

Secara syariat, anggaran belanja negara harus digunakan untuk kepentingan yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar minimal pertahanan, penegakan hukum, kegiatan dakwah islam, penegakan keadilan, administrasi publik, serta untuk melayani kepentingan sosial lainnya.²²

Pemanfaatan anggaran belanja adalah untuk kepentingan penyediaan barang publik sebagaimana hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu negara. Subsidi untuk kalangan lemah, pengeluaran untuk melakukan *treatment* terhadap kondisi ekonomi yang terganggu sehingga menjadi stabil kembali, juga untuk mencukupi kebutuhan modal dan investasi yang mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi suatu negara.²³

B. Alokasi Belanja Modal

1. Pengertian Alokasi Belanja Modal

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah belanja modal. Dengan demikian belanja modal merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.²⁴

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah

²²Mayang Sari Nasution, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU, 2018), h. 11.,

²³ *Ibid.*,

²⁴ Junaedy, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal" (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis, Papua, 2015), h. 167.

dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik (Mardiasmo, 2009).²⁵

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang akan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam pengeluaran biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Halim, 2013 : 107)²⁶.

Menurut Departemen Keuangan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari, bukan untuk dijual.²⁷

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Suatu belanja di kategorikan sebagai belanja modal apabila :²⁸

²⁵M.Rasuli dan Alfiati Silfi, “Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Riau), h.4

²⁶Suci Rohini, “Pengaruh Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Y periode 2015-2017)”, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2019), h.1

²⁷Ibid.,

²⁸Junaedy, “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal”, h. 168

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.²⁹ Maka dari itu, untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik.³⁰

Menurut Standar Akuntansi pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/investaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

²⁹Mawarni, *et. al.*, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada kabupaten dan Kota di Aceh)", dalam *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2, No. 2, Mei 2013*, h. 82.

³⁰Junaedy, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal" h. 167-168.

2. Jenis Belanja Modal

Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu :³¹

a. Belanja Modal tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Sedangkan belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan tanah seperti lapangan olah raga, parkir, penimbungan barang, pemancar, bangunan jalan, bangunan air, bangunan instalasi, dan lain-lain.³²

b. Belanja Modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja modal pengadaan alat-alat besar darat merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pengadaan seperti traktor, *grader*, *excavator*, *pile driver*, *asphalt equipment*, *concrete equipment*, alat pengangkut, mesin proses dan lain-

³¹ Dedi Suprianto, “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Nagan Raya*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat, 2016) h.25-26.

³²Suci Rohini, “*Pengaruh Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Y periode 2015-2017)*”, h. 13

lain. Belanja modal pengadaan alat-alat besar apung merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pengadaan seperti *dredger, floating excavator*, kapal tarik, dan mesin proses apung. Sedangkan belanja modal pengadaan alat-alat bantu merupakan pengeluaran untuk pengadaan alat penarik, *feeder, compressor, electronic generatingset*, dan pembangkit uap air panas.

Belanja modal untuk pengadaan alat angkutan darat bermotor merupakan pengeluaran untuk pengadaan barang seperti kendaraan bermotor dinas, angkutan barang, khusus, roda dua, dan roda tiga. Sedangkan belanja modal pengadaan alat angkutan apung bermotor, merupakan pengeluaran untuk pengadaan alat angkut apung bermotor barang, penumpang, dan khusus.

Belanja modal pengadaan alat kantor merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang seperti mesin ketik, mesin hitung, dan penyimpanan perlengkapan. Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/pejabat merupakan pengeluaran untuk pengadaan meja kerja, meja rapat, kursi meja, kursi rapat, kursi tamu, serta lemari dan arsip kerja.³³

c. Belanja Modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk pengadaan gedung dan bangunan. Gedung

³³*Ibid.*, h.14

dan bangunan meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, bangunan bersejarah tugu peringatan, candi, monumen, rambu-rambu.³⁴

d. Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/ penggantian/ peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD yang terhitung dari tanggal 1 januari hingga 31 Desember pada satu periode tahun anggaran. APBD harus membuat sasaran yang telah ditetapkan melalui fungsi belanjanya, standar pelayanan yang telah diharapkan dan biaya yang telah dianggarkan untuk suatu kegiatan anggaran. APBD harus membuat sasaran yang telah ditetapkan melalui fungsi belanjanya, standar pelayanan yang telah diharapkan dan biaya yang telah dianggarkan untuk suatu kegiatan yang bersangkutan serta sumber pendapatan yang

³⁴*Ibid.*, h.15

diterima APBD untuk digunakan dalam belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan yang bersangkutan serta sumber pendapatan yang diterima APBD untuk digunakan dalam belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal atau investasi, maka APBD harus menggambarkan secara ekonomis dalam kebutuhan peningkatan kualitas daerah tersebut demi memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya.³⁵

C. Desentralisasi Fiskal

Dalam desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, kepada daerah diberikan (Sidik,2001):³⁶

1. Kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri
2. Didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Menurut Saragih (2003:83) desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.³⁷

Desentralisasi Fiskal menurut Andos (2006:7) merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas

³⁵M.Rasuli dan Alfiati Silfi, “Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”, h. 5

³⁶Siti Fatimah Nurhayati, “Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal”, dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 2, No. 1, Juni 2001: 14-28, h.16

³⁷Rudy Badrudin, “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah” (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2012), h. 35.

perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.³⁸

Menurut Rochjadi (2006:7-8), desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.³⁹

Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai penyerahan sebagian dari tanggung jawab fiskal atau keuangan negara dari pemerintah pusat kepada jenjang pemerintah di bawahnya (provinsi, kabupaten atau kota). Desentralisasi fiskal akan memberi manfaat seperti perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengentasan orang miskin, manajemen ekonomi makro yang lebih baik, serta sistem tata pemerintahan (*governance*) yang baik.⁴⁰

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dan undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian di atas mengisyaratkan bahwa desentralisasi memberikan ruang gerak yang lebih bagi

³⁸Ferdian Putra, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal," (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2017), h.6.

³⁹Badrudin, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah", h. 36.

⁴⁰Wahyudi Kumorotomo, *DESENTRALISASI FISKAL POLITIK DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN 1974-2004*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.1.

pemerintah daerah untuk berimprovisasi dalam hal pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah, seperti pelaksanaan tugas-tugas rutin, pelayanan publik, dan peningkatan investasi yang produktif (*capital investment*) di daerahnya.⁴¹

Gagasan desentralisasi fiskal ialah penyerahan beban tugas pembangunan, penyediaan layanan publik dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga tugas-tugas itu akan lebih dekat ke masyarakat. Dengan begitu, kemampuan pemerintah daerah akan dapat ditingkatkan dan pertanggungjawaban akan dapat lebih terjamin.⁴²

Pada umumnya, desentralisasi fiskal dirumuskan sebagai penyerahan usulan fiskal ke bawah, dimana jenjang pemerintahan yang lebih tinggi menyerahkan sebagai kewenangannya mengenai anggaran dan keputusan-keputusan finansial kepada jenjang yang lebih rendah⁴³. Menurut Ebel, Desentralisasi fiskal terkait dengan masalah:⁴⁴

- a. Pembagian peran dan tanggung jawab antarjenjang pemerintahan
- b. Transfer antarjenjang pemerintahan
- c. Penguatan sistem pendapatan daerah atau perumusan sistem pelayanan publik di daerah
- d. Swastanisasi perusahaan milik pemerintah (terkadang menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah); dan
- e. Penyediaan jaring pengaman sosial.

⁴¹Putra, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal," h. 6.

⁴²Wahyudi Kumorotomo, *Desentralisasi Fiskal: Politik Dan Perubahan Kebijakan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) h. 1-6.

⁴³*Ibid.*, h. 11

⁴⁴*Ibid.*,

Masalah-masalah yang mungkin muncul berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di antaranya adalah:⁴⁵

- a. Ketidaksesuaian (*mismatch*) pembiayaan yaitu kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dana, terutama yang disebabkan oleh belum jelasnya pemisahan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota.
- b. Evaluasi pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- c. Penetapan dan penerapan standar minimum bagi pelaksanaan setiap pelayanan masyarakat pada masing-masing bidang atau sektor pemerintah.
- d. Penyelesaian pengalihan aset pemerintah dari pusat ke daerah
- e. Perkiraan biaya dari setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Di Indonesia, pelaksanaan Desentralisasi Fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain :⁴⁶

1. Mengurangi Kesenjangan Fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public didaerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional.
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

⁴⁵Siti Fatimah Nurhayati, “Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal”, h.18

⁴⁶ Putra, “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal,” h.7.

Menurut Mardiasmo (2005: 12-14), agar tujuan desentralisasi fiskal tercapai, maka ada empat elemen utama dalam desentralisasi fiskal yang harus diperhatikan, yaitu sistem dana perimbangan (transfer), sistem pajak dan pinjaman daerah, sistem administrasi dan anggaran pemerintahan pusat dan daerah, dan penyediaan layanan publik dalam konteks penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).⁴⁷

Menurut Fuad dkk (2005:246), aspek keadilan dalam desentralisasi fiskal berkaitan dengan retribusi pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Dalam desentralisasi fiskal, retribusi pendapatan memiliki dua dimensi, yaitu keadilan horisontal dan keadilan lokal. Keadilan horisontal merujuk pada tingkat kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi layanan publik. Dua faktor utama yang memberikan kontribusi munculnya ketidakadilan horisontal adalah basis pajak yang sangat berbeda secara signifikan antardaerah dan karakteristik regional yang mengakibatkan perbedaan biaya penyediaan layanan. Untuk mengurangi ketidakadilan horisontal ini perlu dirancang kebijakan untuk memberikan sumber daya yang lebih besar kepada daerah yang lebih miskin sebagai alat untuk mengoreksi ketidakadilan horisontal tersebut.⁴⁸

Penyediaan sumber daya yang lebih banyak kepada daerah miskin hanyalah satu aspek dari problem keadilan. Kesuksesan dalam kebijakan retribusi juga memerlukan perhatian yang khusus terhadap keadilan lokal. Dalam merancang kebijakan retribusi, pemerintah daerah memerlukan dukungan pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dapat mengambil kebijakan retribusi secara efektif. Mobilitas rumah tangga adalah hambatan riil pemerintah daerah untuk menggunakan kebijakan retribusi. Jika pemerintah daerah

⁴⁷Badrudin, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah", h. 48.

⁴⁸*Ibid.*, hal 45-46

mengeluarkan program retribusi pendapatan secara agresif, maka akan menciptakan suatu insentif yang kuat bagi penduduk berpendapatan rendah untuk datang dan mendorong penduduk berpenghasilan tinggi untuk pindah. Program retribusi pendapatan merupakan pajak bagi penduduk kaya dan sebagai subsidi bagi penduduk miskin.⁴⁹

Sidik (2002) menyebutkan bahwa keberhasilan pelaksanaan desentralisasi sangat tergantung pada desai, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem, nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam layanan sektor publik. Pelaksanaan desentralisasi akan berjalan baik apabila pemerintah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*, serta terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat seperti pada masa Orde Baru (Aziz, 1994: 105-108).⁵⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlela dan Hidayati (2018) menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal mempunyai pengaruh secara signifikan positif terhadap Belanja Modal. Sehingga dapat diindikasikan bahwa Desentralisasi Fiskal yang di proksi dengan besarnya rasio antara Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah menjadi salah satu faktor dalam menentukan Belanja Modal.

⁴⁹*Ibid.*, hal 46

⁵⁰*Ibid.*, hal 46-47

D. Luas Wilayah

Luas wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah keadulatan. Pada masa lampau, sering kali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas wilayah pemerintahan merupakan jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu pemerintah, baik itu pemerintahan kabupaten, kota, maupun geografis suatu daerah (Afkarina, 2017)⁵¹.

Luas wilayah merupakan salah satu mencerminkan kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana daerah sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan public yang baik. Dikaitkan dengan pemekaran daerah maka luas wilayah kemungkinan erat kaitannya dengan penganggaran belanja modal.⁵²

Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran tentunya berupaya membangun daerahnya dengan berbagai fasilitas layanan publik yang lebih layak terutama di wilayah-wilayah yang belum menikmati pembangunan layanan publik seperti :⁵³

- a. Rumah Sakit/ Puskesmas
- b. Gedung Sekolah
- c. Pembuatan tower telekomunikasi
- d. Pembangunan pasar-pasar tempat berdagang

⁵¹Suci Rohini, "Pengaruh Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Y periode 2015-2017)", h.20

⁵²Junaedy, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal" h.167.

⁵³Suci Rohini, "Pengaruh Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Y periode 2015-2017)", h.21

- e. Pembukaan jalur perhubungan berupa dermaga atau jalan-jalan kota yang memudahkan mobilitas masyarakat terutama dari wilayah yang belum terjangkau pemerintah sebelumnya.

Jadi semakin luas daerah yang perlu dibangun maka semakin besar belanja modal yang harus dianggarkan. Penyediaan prasarana berdasarkan wilayah ini tidak lepas juga kaitannya dengan penyebaran penduduk di wilayah tersebut. Dimana ada penduduk maka disana terjadi kegiatan ekonomi. Efisiensi pembangunan wilayah untuk menunjang alokasi sumber daya secara efektif diberbagai wilayah. Keadilan artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membantu wilayah-wilayah yang kurang maju. Karena penduduk mempunyai mobilitas, maka upaya terbaik adalah membantu penduduk yang kurang makmur yang tinggal di suatu wilayah tertentu agar berani pindah ke wilayah lain (Adisasmita,2005).⁵⁴

Luas wilayah dalam penelitian ini merupakan ukuran besarnya daerah wewenang suatu pemerintahan yang dapat diukur dengan satuan angka. Yang mana luas wilayah antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki luas yang tidak sama, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana serta potensi yang dimiliki antara satu daerah dengan daerah yang lainnya pun berbeda.⁵⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ferdian Putra (2017) , Luas Wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Namun jika dianalisis, daerah yang mempunyai wilayah yang cukup luas hal itu justru akan memakan biaya pembangunan yang cukup besar. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup besar. Untuk

⁵⁴Junaedy, “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal” h.167.

⁵⁵Arif Purnama, “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

mewujudkan itu semua maka pemerintah harus cerdas dalam mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran yang akan dibawa oleh pemerintah untuk mewujudkan daerah yang sejahtera.

E. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Di negara berkembang seperti Indonesia, pada umumnya dana investasi masyarakat/ swata masih sangat terbatas, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah melalui APBD, terutama untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, kelistrikan, perhubungan dan lain-lain. Oleh karena itu, penyusunan APBD mesti dilakukan secara cermat, artinya dana yang terbatas dialokasikan pada bidang-bidang yang tepat sesuai skala prioritas sehingga dicapai penggunaan dana yang optimal efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.

Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antardaerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui sumber pendanaan, lahirlah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.⁵⁶

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari anggaran belanja. Apabila APBD diperkirakan surplus maka

⁵⁶Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, (Depok:Rajawali Pers,2018) h. 233-234.

penggunaannya diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari anggaran belanja. Dalam hal APBD diperkirakan defisit maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dengan menggunakan sumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaann piutang.⁵⁷

Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah Belanja Langsung berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset.⁵⁸

SiLPA menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelampauan penerimaan lain-lain, pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun sebelum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan.⁵⁹

⁵⁷*Ibid.*, h. 234

⁵⁸*Ibid.*, h. 235.

⁵⁹*Ibid.*,h.243

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan [PP No. 24 tahun 2005 Lampiran III.IV Pernyataan Sistem Akuntansi Pemerintahan].⁶⁰

Permendagri 13 Tahun 2006, Pasal 137 menyatakan SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :⁶¹

- a) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja
- b) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
- c) Mendanai kewajiban Lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Secara umum SiLPA dapat disebabkan oleh realisasi pendapatan yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Ketidaktercapaian target belanja bisa disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (*output* kegiatan tercapai, tetapi anggarannya tidak terealisasi seluruhnya), kegiatan belum selesai (sehingga anggaran yang belum digunakan dimasukkan ke tahun anggaran berikutnya), dan kegiatan yang batal dilaksanakan.⁶²

Menurut DJPK terjadinya SiLPA dapat disebabkan beberapa sebab diantaranya adanya efisiensi, harga yang tidak sesuai, terlalu tinggi dalam penetapan anggaran, adanya proyek yang belum selesai dalam tahun berjalan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kota/kabupaten.

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ *Ibid.*,h. 251

⁶² *Ibid.*,h. 237

Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efisiensi tentunya sangat baik dan diharapkan. Sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat. Hal ini dapat terjadi misalnya karena infrastruktur tidak mendukung pada suatu proyek atau kegiatan sehingga proyek atau kegiatan tersebut tertunda pelaksanaannya atau malah dibatalkan, ini sangat merugikan masyarakat sebagai pemilik hak atas dana.⁶³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2017), Nurlela dan Hidayati (2018), Wibisono dan Wildaniati (2016), Setiyani (2015), Kusnandar dan Siswantoro (2012) , menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

F. Pertumbuhan Infrastruktur Jalan

1. Infrastruktur Jalan

Investasi jalan raya juga merupakan bagian yang paling penting dalam penyediaan modal barang publik.⁶⁴

Mengingat betapa pentingnya efisiensi dan efektivitas, murahness biaya perjalanan atau transportasi menjadi rujukan untuk sistem transportasi yang baik. Dengan transportasi yang handal, waktu pengiriman barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain bisa direncanakan dan dijadwalkan dengan baik, waktu bisa diatur sesingkat mungkin dan keamanan serta kenyamanan barang dan jasa terjamin.

Biaya transportasi yang rendah memberikan kesempatan pada produsen untuk mendistribusikan produknya dengan kenyamanan barang dan jasa terjamin.

⁶³*Ibid.*,h. 241

⁶⁴Musgrave A. Richard and Musgrave B. Peggy, *KEUANGAN NEGARA DALAM TEORI DAN PRAKTEK EDISI KELIMA* (Jakarta: Erlangga, 2019), h. 178.

Biaya transportasi yang rendah memberikan kesempatan pada produsen untuk mendistribusikan produknya kepedesaan dan daerah terpencil sehingga penduduk dipedesaan bknnya kepedesaan dan daerah terpencil sehingga penduduk dipedesaan bisa membeli barang dan jasa dengan harga bersaing. Selanjutnya jalan juga dapat diklasifikasikan menurut jalan alam (natural) dan jalan buatan (artifikal). Jalan alam ini merupakan pemberian alam dan karena tersedia untuk semua orang tanpa biaya. Sedangkan jalan buatan adalah jalan yang dibangun melalui usaha manusia secara sadar dengan sejumlah investasi dan tertentu untuk membuat konstruksinya dan pemeliharannya.

Klasifikasi jalan dibedakan sebagai berikut :

b. Menurut permukaan jaalan

- 1) Jalan aspal/hotmix : jalan yang permukaannya terkandung atas aspal atau campuran lain yang dikeraskan.
- 2) Jalan kerikil : jalan yang permukaannya terdiri dari kerikil-kerikil kecil dan biasanya jalan jenis ini terdapat pada jalan pra-aspal.
- 3) Jalan tanah : jalan yang permukaannya terdiri dari tanah.

c. Menurut fungsi jalan

- 1) Jalan arteri yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah masuk dibatasi.
- 2) Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpulan dengan ciri-ciri perjalanan masuk dibatasi.
- 3) Jalan local yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

d. Menurut sistem jaringan

- 1) Jalan primer : jalan yang mempunyai peran pelayanan distribusi barang dan jasa yang menghubungkan semua wilayah nasional dan antar perkotaan.

- 2) Jalan sekunder : jalan yang mempunyai peran pelayanan distribusi barang dan jasa hanya dalam kawasan perkotaan.
- e. Menurut status jalan
- 1) Jalan nasional : jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi termasuk jalan tol
 - 2) Jalan provinsi : jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota
 - 3) Jalan kabupaten/kota : jalan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota dengan kecamatan, dan pusat kegiatan lokal.
- f. Menurut kondisi jalan
- 1) Jalan baik adalah jalan yang dapat dilalui dengan kendaraan dengan kecepatan melebihi 60 km/jam dan selama 2 tahun mendatang tanpa pemeliharaan pada pengerasan jalan.
 - 2) Jalan sedang adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan 40-60 km/jam dan selama 1 tahun mendatang tanpa rehabilitasi pada pengerasan jalan.
 - 3) Jalan rusak ringan adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 20-40 km/jam dan perlu perbaikan pondasi jalan.
 - 4) Jalan rusak berat adalah jalan yang hanya dapat dilalui dengan kendaraan dibawah 20 km/jam dan biasanya untuk bentuk permukaannya berbautan kasar atau tanah lumpur.⁶⁵

Penelitian mengenai hubungan antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi antara lain oleh Sodik (2007) yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi regional

⁶⁵Zupi Andriyani Sagala, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Alam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h.24.

dikarenakan pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Hal ini bersesuaian dengan tahapan perkembangan ekonomi sebagaimana diungkapkan oleh Rostow dan Musgrave. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah belanja modal yang dapat mempengaruhi naik/turunnya PRDB adalah belanja pembangunan infrastruktur yang dapat menyentuh langsung pada perekonomian masyarakat.⁶⁶

G. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

Variabel	Peneliti/Tahun, Metode	Sampel , Analisis	Hasil Penelitian
Independen : Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dependen : Pengalokasian Belanja Modal	Ferdian Putra/2017 Metode : Penelitian Kausatif	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan uji t	Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, Luas wilayah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.
Independen : Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Cahyani Nurlela dan Nur Hidayati/2018 Metode : Penelitian Kausatif	Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi dalam penelitian dijadikan sampel .	Secara simultan Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh secara

⁶⁶Guntur Hendriwiyanto, "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi," (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014), h.39-40.

Dependen : Pengalokasian Belanja Modal		Teknik analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan uji t	signifikan pada Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Dependen : Belanja Modal	Ainun Jariyah/2014 Metode : Penelitian Empiris	Sampel dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/Kota di Jawa Tengah Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi linear berganda	Berdasarkan uji t DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, SiLPA, dan Luas Wilayah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun secara simultan (F) Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Independen: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan	Junaedy/2015	Sampel pada penelitian ini adalah beberapa Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi Papua yang diambil	Hasil analisis diperoleh bahwa secara parsial DAU dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja

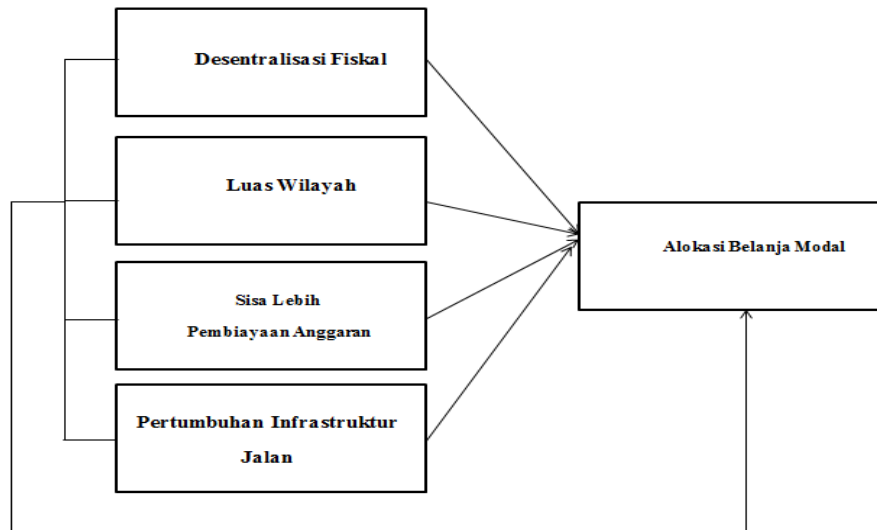
<p>Anggaran, dan Luas Wilayah</p> <p>Dependen : Belanja Modal</p>		<p>melalui teknik Purposive sampling.</p> <p>Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi linear berganda.</p>	<p>modal. Sedangkan PAD, SiLPA, dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.</p> <p>Namun secara simultan DAU, PAD, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal</p>
<p>Independen : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah</p> <p>Dependen : Belanja Modal</p>	<p>Kusnandar dan Dodik Siswantoro/2012</p> <p>Metode : Penelitian Kuantitatif</p>	<p>Data sampel terdiri dari 292 Laporan keuangan Pemerintah daerah.</p> <p>Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda</p>	<p>Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan PAD, SiLPA, dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal.</p>

H. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran adalah suatu kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran berisikan rangkaian penalaran peneliti untuk menjawab rumusan masalah dari hasil kajian pustaka. Kerangka pemikiran ini dapat dikatakan pula merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁶⁷

⁶⁷Arfan Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung: Citapustaka, 2014), h.71-72.

Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan. Berdasarkan uraian teori diatas maka dapat dibuat kerangka konseptual berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

I. Hipotesis

1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004).⁶⁸

Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada

⁶⁸Putra, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal," h. 10-11.

kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan tersebut.⁶⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlela dan Hidayati (2018) menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal mempunyai pengaruh secara signifikan positif terhadap Belanja Modal. Sehingga dapat diindikasikan bahwa Desentralisasi Fiskal yang di proksi dengan besarnya rasio antara Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah menjadi salah satu faktor dalam menentukan Belanja Modal.

Hal ini sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima yang diprosikan kedalam Desentralisasi Fiskal. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali penerimaan yang sebesar-besarnya.⁷⁰

2. Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan wilayah yang tidak begitu luas. ⁷¹Undang-Undang Nomor 33

⁶⁹Putra, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal," h. 10.

⁷⁰*Ibid.*, h. 11.

⁷¹Kusnandar dan Dodik Siswanto, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal", (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012), h. 4.

Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah.⁷² Kaitan antara Luas Wilayah Daerah dengan alokasi Belanja Modal yang kemudian dihubungkan dengan adanya hubungan keagenan hal ini dapat terlihat ketika suatu daerah ingin melakukan pemekaran wilayah dimana disitu terjadi konflik antara daerah dan pusat. Daerah mengalami kecemburuan sosial pada pusat karena alokasi dan distribusi pendapatan yang dikembalikan dari pemerintah pusat ke daerah dari hasil eksplorasi sumber-sumber daya di daerah dirasa kurang adil.⁷³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ferdian Putra (2017) , Luas Wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Namun jika dianalisis, daerah yang mempunyai wilayah yang cukup luas hal itu justru akan memakan biaya pembangunan yang cukup besar. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup besar. Untuk mewujudkan itu semua maka pemerintah harus cerdas dalam mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran yang akan dibawa oleh pemerintah untuk mewujudkan daerah yang sejahtera.

3. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain, pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan

⁷²Putra, “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal,” h. 11.

⁷³*Ibid.*,

akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Dibandingkan rencana anggaran yang disahkan pada awal tahun (APBD-M), SiLPA lebih disebabkan oleh kegagalan dalam merealisasikan belanja dibandingkan keberhasilan realisasi pendapatan.⁷⁴

Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah Belanja Langsung berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan asset dan sebagainya.⁷⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2017), Nurlela dan Hidayati (2018), Wibisono dan Wildaniati (2016), Setiyani (2015), Kusnandar dan Siswantoro (2012) , menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

4. Pengaruh Pertumbuhan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor ini menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih merata dan lebih mensejahterakan masyarakat .

Program peningkatan belanja modal, mau tak mau akan menyentuh langsung peningkatan pembangunan beragam infrastruktur, seperti sarana pertanian, transportasi, dan infrastruktur lain yang langsung menopang produktivitas dan kesejahteraan rakyat.itu berarti di masa mendatang, semua belanja akan berorientasi ke daerah, karena membangun bangsa adalah pembangunan daerah serta meembentuk kapital atau modal yang semakin besar di daerah.

⁷⁴*Ibid.*,

⁷⁵Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, h. 251.

Oleh karena itu anggaran infrastruktur, sektor pertanian, kesehatan dan transportasi akan dilipatgandakan. Sedangkan biaya operasional, perjalanan dinas, ataupun belanja modal yang tidak produktif harus diturunkan. Sehingga alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan alokasi anggaran pembangunan yang terencana dan lebih berpihak kepada publik tersebut diharapkan akan memediasi serta menjembatani terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang optimal dengan ketersediaan dana berupa pendapatan daerah (PAD dan dana perimbangan) sebagai sumber pembiayaannya (*financing*).⁷⁶ Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik terhadap pembangunan.⁷⁷

Penelitian mengenai hubungan antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi antara lain oleh Sodik (2007) yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi regional dikarenakan pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Hal ini bersesuaian dengan tahapan perkembangan ekonomi sebagaimana diungkapkan oleh Rostow dan Musgrave. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah belanja modal yang dapat mempengaruhi naik/turunnya PRDB adalah belanja pembangunan infrastruktur yang dapat menyentuh langsung pada perekonomian masyarakat.⁷⁸

⁷⁶Guntur Hendriwiyanto, "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi," (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014), h.4.

⁷⁷*Ibid.*, h. 39

⁷⁸*Ibid.*, h. 39-40

Berdasarkan landasan teori diatas maka hipotesisnya sebagai berikut :

- H₁ : Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
- H₂ : Luas Wilayah berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal
- H₃ : SiLPA berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
- H₄ : Pertumbuhan Infrastruktur Jalan berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
- H₅ : Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, SiLPA, dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan secara simultan berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Kausal Komparatif (Kausatif) dengan pendekatan Kuantitatif. Penelitian Kausatif berguna untuk menemukan kemungkinan hubungan antara sebab yang menjadi variabel bebas dengan akibat yang muncul sebagai variabel terikatnya berdasarkan pengamatan peneliti. Atau dengan kata lain penelitian kausatif berguna untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

B. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

KEGIATAN	BULAN																																							
	Nop-19				Des-19				Jan				Feb				Apr				Mei				Jun				Jul				Ags				Sept			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																																								
Penulisan Proposal																																								
Bimbingan Proposal																																								
Seminar Proposal																																								
Keluar SK Pembimbing																																								
Bimbingan Skripsi dan Penelitian																																								
Penulisan Laporan dan Pembahasan																																								

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti.⁷⁹Populasi atau universe adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan obyek penelitian.⁸⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD keseluruhan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019 yaitu 33 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut.⁸¹

Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan menentukan kriteria sebagai berikut :

- a. Kabupaten/Kota yang sudah mempublikasikan data APBD dan tersedia di *internet* untuk tahun anggaran 2015-2019.
- b. Kabupaten/Kota yang memiliki data PAD, DBH Pajak, DBH Bukan Pajak, SiLPA, dan Belanja Modal.

Tabel 3.2
Penentuan Sampel

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kriteria 1	Kriteria 2
1	Kab. Asahan	✓	
2	Kab. Dairi	✓	✓
3	Kab. Deli Serdang	✓	✓
4	Kab. Karo	✓	
5	Kab. Labuhanbatu	✓	✓
6	Kab. Langkat	✓	

⁷⁹Azahri Akmal Tarigan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La Tansa Press, 2012), h. 70.

⁸⁰*Ibid.*, h.71.

⁸¹Arfan Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*,h.

7	Kab. Mandailing Natal	✓	✓
8	Kab. Nias	✓	✓
9	Kab. Simalungun	✓	✓
10	Kab. Tapanuli Selatan	✓	✓
11	Kab. Tapanuli Tengah	✓	✓
12	Kab. Tapanuli Utara	✓	✓
13	Kab. Toba Samosir	✓	✓
14	Kab. Pakpak Bharat	✓	
15	Kab. Nias Selatan	✓	
16	Kab. Humbang Hasundutan	✓	✓
17	Kab. Serdang Bedagai	✓	
18	Kab. Samosir	✓	✓
19	Kab. Batu Bara	✓	✓
20	Kab. Padang Lawas	✓	
21	Kab. Padang Lawas Utara	✓	✓
22	Kab. Labuhanbatu Selatan	✓	✓
23	Kab. Labuhanbatu Utara	✓	
24	Kab. Nias Utara	✓	✓
25	Kab. Nias Barat	✓	
26	Kota Binjai	✓	✓
27	Kota Medan	✓	✓
28	Kota Pematang Siantar	✓	✓
29	Kota Sibolga	✓	✓
30	Kota Tanjung Balai	✓	✓
31	Kota Tebing Tinggi	✓	
32	Kota Padang Sidempuan	✓	✓
33	Kota Gunung Sitoli	✓	✓

Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditentukan bahwa sampel dalam penelitian ini adalah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, yaitu 16 Kabupaten dan 7 Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.⁸² Data Kuantitatif pada penelitian ini adalah dari Laporan Realisasi APBD, Data Luas Wilayah dan Data Panjang Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara .

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.⁸³ Peneliti mendapatkan data sekunder dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2015-2019 dan Data Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota serta data Luas Wilayah yang diperoleh dari situs resmi www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.bps.go.id .

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. berupa data Laporan Realisasi APBD (Tahun 2015-2019) Luas Wilayah wilayah dan Data Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota Dan Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁸² Advernesia, "Pengertian Data Kuantitatif dan Kualitatif serta Contohnya", <https://www.advernesia.com/blog/data-science/pengertian-data-kuantitatif-dan-kualitatif-serta-contohnya/> (diakses pada 23 Desember 2019, pukul 21.39)

⁸³ Arfan Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, h. 122.

F. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Defenisi Operasional merupakan suatu defenisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman dan mengukur konsep.⁸⁴

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.⁸⁵

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengalokasian belanja modal (Y). Rumus menentukan besarnya Alokasi Belanja Modal sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

2. Variabel Independen (X)

Variabel Independen sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).⁸⁶

Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

a) Desentralisasi Fiskal (X₁)

Rumus Desentralisasi Fiskal dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD} + \text{DBH (Pajak)} + \text{DBH (Bukan Pajak)}}{\text{Realisasi Total Pengeluaran Kabupaten/ Kota}} \times 100 \%$$

⁸⁴*Ibid.*,h. 70-71.

⁸⁵ Azhari Akmal Tarigan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La Tansa Press, 2012), h. 57.

⁸⁶*Ibid.*,

b) Luas Wilayah (X_2)

Luas wilayah daerah dapat diukur dengan melihat berapa luas wilayah daerah tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur luas wilayah dalam penelitian adalah satuan km^2 .

Rasio pertumbuhan Luas Wilayah :

$$\frac{\text{L.Wilayah Baru} - \text{L.Wilayah Lama}}{\text{L.Wilayah Lama}} \times 100 \%$$

c) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (X_3)

SiLPA adalah sisa lebih pembiayaan anggaran yang berasal dari tahun sebelumnya. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pembiayaan SiLPA} = \frac{\text{SiLPA}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

d) Pertumbuhan Infrastruktur Jalan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Panjang Jalan Baru} - \text{Panjang Jalan Lama}}{\text{Panjang Jalan lama}} \times 100 \%$$

Tabel 3.3
Variabel Independen dan Variabel Dependen

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Instrumen Penelitian
Desentralisasi Fiskal (X) (Indpenden)	Jumlah dari {PAD+DBH (pajak) + DBH(bukan pajak)} : Realisasi Total Pengeluaran Kabupaten/Kota x 100%	Rasio	Laporan Realisasi APBD

Luas Wilayah (X) (Indpenden)	(Luas Wilayah baru – Luas Wilayah Lama) : Luas Wilayah lama x 100%	Rasio	Data Luas Wilayah
Sisa Lebih Pembiayaan Angaran (X) (Indpenden)	SiLPA : Total Belanja Daerah x 100%	Rasio	Laporan Realisasi APBD
Pengalokasian Belanja Modal (Y) (Dependen)	Belanja Modal : Total Belanja Daerah x 100%	Rasio	Laporan Realisasi APBD
Pertumbuhan Infrastruktur Jalan	(Panjang jalan baru – Panjang Jalan Lama) : Panjang jalan lama x 100%	Rasio	Data Panjang jalan

G. Teknik Analisa Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan *Microsoft Excel* dan *Eviews 10*. Dengan melalui beberapa tahap , yaitu :

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan minimum, maximum, mean, dan deviasi standar.⁸⁷

2. Penentuan Model Estimasi

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain :

a) Common Effect atau Pooled Least Square (PLS)

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya menggabungkan data time series dan cross section kemudian di estimasi menggunakan metode Ordinary Least Square atau teknik kuadrat terkecil. Model estimasi ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu.

Kekurangan model asumsi ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan sebenarnya. Secara umum bentuk model CEM yang dapat digunakan adalah :

$$Y_{ti} = X_{ti}\beta_{ti} + \varepsilon_{ti}$$

Keterangan :

Y_{ti} : observasi dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu ke-t

X_{ti} : vector k-variabel independen dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu ke-t

ε_{ti} : komponen error yang diasumsikan memiliki harga mean 0 dan variasi homogen dalam waktu serta independen dengan X_{ti} .

⁸⁷Azhari Akmal Tarigan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La Tansa Press, 2012), h. 150.

b) Fixed Effect Model (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa adanya perbedaan antar individu dapat diakomodasi melalui perbedaan intersepnya. Model estimasi ini biasanya disebut juga dengan teknik Least Square Dummy Variabel (LSDV), menurut Winarno (2007:9,14) maksud efek tetap ini adalah bahwa satu objek memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian pula dengan koefisien regresinya, tetap besarnya waktu ke waktu (time invariant). Bentuk model FEM yang dapat digunakan adalah :

$$Y_{ti} = X_{ti}\beta + c_i + dt + \epsilon_{ti}$$

Keterangan :

c_i : konstanta yang bergantung kepada unit ke-i tetapi tidak kepada waktu t

dt : konstanta yang bergantung kepada waktu t tetapi tidak kepada unit t

c) Random Effect Model (REM)

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS). Menuliskan model REM sebagai berikut :⁸⁸

$$Y_{ti} = X_{ti}\beta + v_{ti}$$

3. Tahapan Analisis Data

Untuk menganalisis data panel diperlukan uji spesifikasi model yang tepat untuk menggambarkan data, uji tersebut yaitu :

a) Uji Chow

Uji chow yakni pengujian untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *fixed effect* lebih baik dari regresi model

⁸⁸Baiq Nanda Aulia, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Yield To Maturity Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Sukuk Yang Beredar Di Bursa Efek Inonesia Periode 2015-2016" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h.41-43.

data panel tanpa variabel dummy atau model *commont effect* dengan melihat *sum of residuals* (RSS) dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect model* atau *Pooled OLS*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan *F-statistic* dengan *F-tabel*. Perbandingan dipakai apabila hasil F-hitung lebih besar (>) dari f tabel maka H_0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect model*.

b) Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* lebih baik dari metode *Random Effect*. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistic *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman < dari nilai kritisnya yaitu 0,05 (5%), maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman > dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*.⁸⁹

⁸⁹Baiq Nanda Aulia,:"*Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Yield To Maturity Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Sukuk Yang Beredar Di Bursa Efek Inonesia Periode 2015-2016*"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2018), h.44-45.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari :

a) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson (D-W), yaitu :

- Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Jika nilai D-W dibawah -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif⁹⁰

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *Breusch-Pagan*. Dalam uji ini, apabila nilai Probabilitas (Obs*R-Squared) > 0.05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, karena model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.⁹¹

c) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linier mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk masing-masing

⁹⁰Azhari Akmal Tarigan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La Tansa Press, 2012), h..186.

⁹¹Yolanda Wulandari, "Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2014), h.9-10.

variabel Independen yaitu jika Variabel Independen mempunyai nilai VIF tidak melebihi 10 berarti tidak terjadi multikolinearitas.⁹²

d) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas, variabel tidak bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan menggunakan metode Jarque-bera (JB). Apabila nilai JB lebih kecil dari 2 maka data terdistribusi normal atau jika probabilitas lebih besar dari 5% maka data berdistribusi normal.

Menurut Ajija, Shochrul Rohmatul dkk (2011) uji normalitas hanya digunakan jika jumlah observasi adalah kurang dari 30, untuk mengetahui apakah error term mendekati distribusi normal. Jika jumlah observasi lebih dari 30, tidak perlu dilakukan uji normalitas. Sebab, distribusi sampling error term telah mendekati normal.

5. Uji Regresi Data Panel

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka dalam menganalisis permasalahan (data) penulis akan menggunakan metode regresi Data Panel. Data panel (pool) yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) dengan data silang (cross section).

Uji regresi data panel ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan) terhadap variabel dependen (Belanja Modal).⁹³

Persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$BM = \alpha + b_1 DF + b_2 LW + b_3 SiLPA + b_4 PIJ + \varepsilon$$

Keterangan :

⁹²Azhari Akmal Tarigan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La Tansa Press, 2012), h.187.

⁹³Annisa Amalia Fairuz, "Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas, Rasio Pasar, Inflasi Dan Kurs Terhadap Return Saham Syariah (Studi Pada Saham Syariah Yang Tergabung Dalam Kelompok ISSI Pada Sektor Industri Tahun 2011-2015)" (Skripsi, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.42-43

BM	= Belanja Modal
α	= Konstanta
b	= Slope atau koefisien regresi atau intersep
DF	= Desentralisasi Fiskal
LW	= Luas Wilayah
SiLPA	= Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
PIJ	= Pertumbuhan Infrastruktur Jalan
ε	= <i>error</i>

6. Uji Hipotesis

a) Uji t (Hipotesis)

Uji statistik t adalah uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.⁹⁴ Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0.05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan (α) < 0,05 dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan (α) > 0,05

Kriteria :

- Jika t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- Jika t hitung < t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak

b) Uji F (Simultan)

Uji statistik F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen.⁹⁵ Signifikan model regresi secara simultan diuji dengan melihat nilai signifikan (sig) dimana jika nilai sig dibawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteia :

- Jika F hitung > F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

⁹⁴*Ibid.*, h.199.

⁹⁵*Ibid.*

b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ($0 \leq R \leq 1$).

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas⁹⁶

⁹⁶*Ibid.*, h.199-200.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara beribukota Medan. Terletak antara 10 – 40 LU, 980 – 1000 B.T. Batas wilayahnya sebelah utara Provinsi Aceh dan Selat Sumatera, sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah Timur di batasi oleh Selat Sumatera.

Daerahnya terdiri atas pantai dan dataran rendah di sebelah timur dan barat provinsi ini, dan dataran tinggi yang terdapat di dataran tinggi Karo, Toba Samosir dan Humbang Hasundutan. Gunung-gunungnya antara lain Sibayak, Sinabung, Martimbang, Sorik Marapi dan Lain-lain. Kemudian Sungai-sungainya adalah sungai Wampu, Batang Serangan, Deli, Asahan dan lain-lainnya.

Kekayaan alam yang dimiliki Sumatera Utara antara lain adalah minyak bumi, batu bara, belerang, emas, dan sebagainya yang merupakan hasil tambang. Dan kini provinsi ini dikenal lagi dengan bendungan raksasa Asahan dengan air terjun Sigura-gura yang merupakan proyek besar pembangkit tenaga listrik. Flora di Sumatera Utara juga bermacam-macam, dari mulai tanaman yang ada di hutan dengan hasil hutan kayu, dammar dan rotan, juga tanaman yang diusahakan oleh penduduk seperti padi, sayur-sayuran dan tanaman perkebunan lainnya.⁹⁷

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 10-40 Lintang Utara dan 980-1000 Bujur Timur, yang terdiri dari 25 kabupaten, 8 kota, 444 kecamatan, 693 kelurahan, dan 5.417 desa dengan jumlah penduduk

⁹⁷Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, "Profil Sumut", <http://www.bpkp.go.id/sumut/konten/236/> (diakses pada 28 September 2020, pukul 19.18)

pada tahun 2017 mencapai 14.725093 jiwa dan luas wilayah 72.981,23 km².

Berikut ini tabel kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara :

Tabel 4.1
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Kabupaten/Kota
1	Kab. Asahan
2	Kab. Dairi
3	Kab. Deli Serdang
4	Kab. Karo
5	Kab. Labuhanbatu
6	Kab. Langkat
7	Kab. Mandailing Natal
8	Kab. Nias
9	Kab. Simalungun
10	Kab. Tapanuli Selatan
11	Kab. Tapanuli Tengah
12	Kab. Tapanuli Utara
13	Kab. Toba Samosir
14	Kab. Pakpak Bharat
15	Kab. Nias Selatan
16	Kab. Humbang Hasundutan
17	Kab. Serdang Bedagai
18	Kab. Samosir
19	Kab. Batu Bara
20	Kab. Padang Lawas
21	Kab. Padang Lawas Utara
22	Kab. Labuhanbatu Selatan
23	Kab. Labuhanbatu Utara
24	Kab. Nias Utara
25	Kab. Nias Barat
26	Kota Binjai
27	Kota Medan
28	Kota Pematang Siantar
29	Kota Sibolga
30	Kota Tanjung Balai
31	Kota Tebing Tinggi
32	Kota Padang Sidempuan
33	Kota Gunung Sitoli

Sumatera Utara tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan. Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar kabupaten di Sumatera Utara maupun antara Sumatera Utara dengan provinsi lainnya. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai property untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain-lain. Tentu saja sektor lain, seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatera Utara dibagi kedalam empat wilayah pembangunan.

2. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yaitu *Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan* terhadap variabel dependen yaitu *Belanja Modal*. Pada bab IV ini akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS (*statistical product and service solution*) version 25 for windows.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, dan objek penelitian yaitu Laporan APBD (tahun 2015-2019).

a. Alokasi Belanja Modal

Belanja modal pada penelitian ini yaitu belanja modal Kabupaten/Kota tahun 2015-2019, dengan rumus :

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019 yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Alokasi Belanja Modal Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	BELANJA MODAL				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Toba Samosir	164.9031	0.1431	0.1617	0.1253	0.1205
Kab. Mandailing Natal	0.1758	0.1554	0.1711	0.1245	0.1294
Kab. Labuhanbatu	0.2075	0.1997	0.2388	0.2287	0.2250
Kab. Nias	0.2857	0.3076	0.2626	0.2257	0.1186
Kab. Simalungun	0.1557	0.0668	0.0837	0.2401	0.1582
Kab. Dairi	0.1434	0.2030	0.2030	0.1355	0.1542
Kab. Labuhanbatu Selatan	0.2478	0.3014	0.2589	0.2581	0.2109
Kab. Deli Serdang	0.2710	0.2164	0.1851	0.1852	0.2212
Kab. Tapanuli Tengah	0.1930	0.2081	0.1578	0.2402	0.1496
Kab. Humbang Hasundutan	0.2085	0.2351	0.2186	0.1762	0.1984
Kab. Tapanuli Selatan	0.2542	0.2572	0.2107	0.2290	0.2359
Kab. Tapanuli Utara	0.1660	0.1969	0.0770	0.1313	0.1452
Kab. Samosir	0.2190	0.2755	0.2784	0.2152	0.2072
Kab. Batu Bara	0.2256	0.2236	0.1539	0.1430	0.1753
Kab. Padang Lawas Utara	0.2490	0.2282	0.2420	0.1812	0.1982
Kab. Nias utara	0.3585	0.3593	0.3589	0.2643	0.2788
Kota Sibolga	0.2084	0.2867	0.1961	0.2059	0.1371
Kota Padang Sidempuan	0.1319	0.1218	0.2068	0.1307	0.1578
Kota Tanjung Balai	0.1621	0.1741	0.2011	0.3199	0.2847
Kota Medan	0.2215	0.2212	0.2463	0.2143	0.2012
Kota Gunung Sitoli	0.2915	0.2691	0.2580	0.3740	0.3272
Kota Binjai	0.1882	0.2117	0.1975	0.2210	0.0902
Kota Pematang Siantar	0.1213	0.1739	0.2604	0.2429	0.2285

Sumber : data sekunder yang diolah

b. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini adalah proksi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2015-2019, dengan rumus :

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD} + \text{DBH (Pajak)} + \text{DBH (Bukan Pajak)}}{\text{Realisasi Total Pengeluaran Kabupaten/ Kota}} \times 100 \%$$

Berikut ini Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019 yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Desentralisasi Fiskal Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	DESENTRALISASI FISKAL				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Toba Samosir	0.0416	0.0366	0.0380	0.0410	0.0657
Kab. Mandailing Natal	0.0561	0.0513	0.0613	0.0747	0.0916
Kab. Labuhanbatu	0.1226	0.1240	0.1124	0.1208	0.1514
Kab. Nias	0.0974	0.0729	0.0815	0.0878	0.1168
Kab. Simalungun	0.0536	0.0578	0.0974	0.1893	0.1070
Kab. Dairi	0.0678	0.0671	0.0574	0.0846	0.0878
Kab. Labuhanbatu Selatan	0.0567	0.0445	0.0454	0.0590	0.1314
Kab. Deli Serdang	0.1931	0.1881	0.1846	0.2635	0.3066
Kab. Tapanuli Tengah	0.0532	0.0535	0.0649	0.0813	0.1109
Kab. Humbang Hasundutan	0.0364	0.0363	0.0414	0.0599	0.0774
Kab. Tapanuli Selatan	0.0846	0.0731	0.0683	0.0868	0.1964
Kab. Tapanuli Utara	0.0478	0.0491	0.0765	0.0787	0.1059
Kab. Samosir	0.0386	0.0345	0.0514	0.0602	0.0820
Kab. Batu Bara	0.0492	0.0510	0.0473	0.0577	0.0963
Kab. Padang Lawas Utara	0.0381	0.0282	0.0284	0.0434	0.0612
Kab. Nias utara	0.0674	0.0328	0.0384	0.0868	0.0329
Kota Sibolga	0.2660	0.0741	0.1207	0.1582	0.1973
Kota Padang Sidempuan	0.0940	0.0829	0.1099	0.1082	0.1306
Kota Tanjung Balai	0.0802	0.0834	0.0859	0.0666	0.1219
Kota Medan	0.3310	0.3288	0.3449	0.3731	0.4163
Kota Gunung Sitoli	0.0690	0.0361	0.0467	0.0349	0.0480
Kota Binjai	0.0905	0.0836	0.1029	0.1395	0.1876
Kota Pematang Siantar	0.1247	0.1067	0.0969	0.1261	0.1314

Sumber : data sekunder yang diolah

c. Luas Wilayah

Luas Wilayah pada penelitian ini adalah Data Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2019, dengan rumus :

Rasio pertumbuhan Luas Wilayah :

$$\frac{L. \text{Wilayah Baru} - L. \text{Wilayah Lama}}{L. \text{Wilayah Lama}} \times 100 \%$$

Berikut ini Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019 yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Luas Wilayah Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	LUAS WILAYAH				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Toba Samosir	0.0000	-0.0100	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Mandailing Natal	0.0000	-0.0735	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Labuhanbatu	0.0000	-0.1583	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Nias	0.0000	0.8795	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Simalungun	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Dairi	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Labuhanbatu Selatan	0.0000	0.1540	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Deli Serdang	0.0000	-0.0983	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Tapanuli Tengah	0.0000	0.0139	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Humbang Hasundutan	0.0000	0.0166	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Tapanuli Selatan	0.0000	0.3854	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Tapanuli Utara	0.0000	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Samosir	0.0000	-0.1498	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Batu Bara	0.0000	0.0191	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Padang Lawas Utara	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Nias utara	0.0000	-0.1990	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Sibolga	0.0000	2.8357	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Padang Sidempuan	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Tanjung Balai	0.0000	0.7528	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Medan	0.0000	-0.0004	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Gunung Sitoli	0.0000	-0.4018	0.0000	0.0000	0.0000

Kota Binjai	0.0000	-0.3441	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Pematang Siantar	0.0000	-0.3040	0.0000	0.0000	0.0000

Sumber : data sekunder yang diolah

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Penelitian ini adalah Data SiLPA pada Laporan APBD tahun 2015-2019 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, dengan rumus :

$$\text{Rasio Pembiayaan SiLPA} = \frac{\text{SiLPA}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Berikut ini Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019 yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Rasio Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	SiLPA				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Toba Samosir	133.7515	0.0719	0.0964	0.0516	0.0506
Kab. Mandailing Natal	0.1010	0.0516	0.0083	0.0064	0.0155
Kab. Labuhanbatu	0.0377	0.0947	0.0134	0.0999	0.0520
Kab. Nias	0.2024	0.1583	0.1438	0.2349	0.0386
Kab. Simalungun	0.0489	0.0548	0.0095	0.0003	0.0014
Kab. Dairi	0.1091	0.1271	0.1258	0.0346	0.0377
Kab. Labuhanbatu Selatan	0.0786	0.0753	0.0407	0.0438	0.0505
Kab. Deli Serdang	0.0480	0.0733	0.0569	0.1075	0.1008
Kab. Tapanuli Tengah	0.1060	0.0577	0.0354	0.0126	0.0206
Kab. Humbang Hasundutan	0.1693	0.1456	0.1288	0.0689	0.0675
Kab. Tapanuli Selatan	0.0331	0.0443	0.0342	0.0240	0.0367
Kab. Tapanuli Utara	0.1188	0.0427	0.0305	0.0342	0.0187
Kab. Samosir	0.1594	0.0870	0.0355	0.0060	0.0174
Kab. Batu Bara	0.1417	0.0935	0.0811	0.0891	0.0249
Kab. Padang Lawas Utara	0.1491	0.1005	0.0335	0.0268	0.0268
Kab. Nias utara	0.1223	0.0558	0.0167	0.0025	0.0306
Kota Sibolga	0.1264	0.0289	0.0539	0.0017	0.0075
Kota Padang Sidempuan	0.0577	0.0067	0.0293	0.0167	0.0184
Kota Tanjung Balai	0.1407	0.1054	0.4901	0.0313	0.0042

Kota Medan	0.0001	0.0066	0.0080	0.0066	0.0163
Kota Gunung Sitoli	0.2155	0.1693	0.0601	0.0126	0.0233
Kota Binjai	0.0552	0.0177	0.0499	0.0005	0.0118
Kota Pematang Siantar	0.0725	0.1517	0.0804	0.0351	0.0908

Sumber : data sekunder yang diolah

e. Pertumbuhan Infrastruktur Jalan

Pertumbuhan Infrastruktur Jalan pada penelitian ini adalah Data Panjang Jalan Kabupaten/Kota tahun 2015-2019 , dengan rumus :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Panjang Jalan Baru} - \text{Panjang Jalan Lama}}{\text{Panjang Jalan lama}} \times 100 \%$$

Berikut ini Panjang Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019 yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Pertumbuhan Infrastruktur Jalan Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	PANJANG JALAN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Toba Samosir	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Mandailing Natal	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000
Kab. Labuhanbatu	0.0000	0.0000	-0.0911	-0.0001	0.0000
Kab. Nias	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Simalungun	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Dairi	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Labuhanbatu Selatan	0.0000	0.0000	0.0801	0.0000	0.0000
Kab. Deli Serdang	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Tapanuli Tengah	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Humbang Hasundutan	0.0000	0.0000	-0.1678	0.0000	0.0000
Kab. Tapanuli Selatan	0.0000	0.0000	-0.0277	0.0000	0.0000
Kab. Tapanuli Utara	0.0000	0.0000	0.0000	-0.1139	0.0000
Kab. Samosir	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0965	0.0000
Kab. Batu Bara	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Padang Lawas Utara	0.0000	0.0000	-0.1139	0.0000	0.0000
Kab. Nias utara	0.0000	0.0000	0.0781	-0.0726	0.0000
Kota Sibolga	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Kota Padang Sidempuan	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Tanjung Balai	0.0000	0.0000	0.0160	0.0152	0.0000
Kota Medan	0.0000	0.0000	0.0869	0.0000	0.0000
Kota Gunung Sitoli	0.0000	0.0000	0.0668	0.0000	0.0000
Kota Binjai	0.0000	0.0000	-0.2109	0.0215	0.0000
Kota Pematang Siantar	0.0000	0.0000	0.0000	0.0730	0.0000

Sumber : data sekunder yang diolah

Dari data laporan APBD kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara pada belanja modal, luas wilayah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan pertumbuhan infrastruktur jalan tahun 2015-2019 diatas, adapun bentuk analisis deskriptif statistiknya sebagai berikut :

Tabel 4.7
Analisis Deskriptif Statistik

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal (Y)	115	0,067	164,903	1,640	15,358
Desentralisasi Fiskal (X1)	115	0,028	0,416	0,100	0,076
Luas Wilayah (X2)	115	-0,402	2,836	0,029	0,295
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)	115	0,000	133,752	1,228	12,466
Pertumbuhan Infrastruktur Jalan (X4)	115	-0,211	0,087	-0,004	0,036

Sumber : data diolah peneliti

Dari hasil output diatas dengan jumlah pengamatan lima tahun dimulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019, dapat dijelaskan bahwa :

1. Jumlah data (N) pada setiap variabel yaitu belanja modal, luas wilayah, SiLPA dan pertumbuhan infrastruktur jalan dinyatakan valid, hal ini menunjukkan tidak adanya data yang hilang (*missing*) yaitu berjumlah 115 data.
2. Nilai terendah atau minimum dari variabel belanja modal adalah pada rasio 0,067 yaitu belanja modal Simalungun pada tahun 2016. Nilai minimum dari variabel desentralisasi fiskal adalah pada rasio 0,028 yaitu desentralisasi fiskal Padang lawas Utara pada tahun 2016. Nilai minimum dari variabel luas wilayah adalah pada rasio -0,402 yaitu luas wilayah Gunungsitoli pada tahun 2016 Nilai minimum pada variabel SiLPA adalah pada rasio 0,000 yaitu SiLPA Medan pada tahun 2015. Nilai minimum pada variabel Pertumbuhan infrastruktur jalan adalah

pada rasio -0,211 yaitu pertumbuhan infrastruktur jalan Binjai pada tahun 2017.

3. Nilai tertinggi atau maximum dari variabel belanja modal adalah pada rasio 164,903 yaitu belanja modal Toba Samosir pada tahun 2015. Nilai maximum dari variabel desentralisasi fiskal adalah pada rasio 0,416 yaitu desentralisasi fiskal Medan pada tahun 2019. Nilai maximum dari variabel luas wilayah adalah pada rasio 2,836 yaitu luas wilayah Sibolga pada tahun 2016. Nilai maximum pada variabel SiLPA adalah pada rasio 133,752 yaitu SiLPA Toba Samosir pada tahun 2015. Nilai maximum pada variabel Pertumbuhan infrastruktur jalan adalah pada rasio 0,087 yaitu pertumbuhan infrastruktur jalan Medan pada tahun 2017.
4. Nilai rata-rata (*mean*) adalah nilai total dibagi dengan jumlah kejadian (*frekuensi*), dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata variabel belanja modal sebesar 1,640, nilai rata-rata variabel desentralisasi fiskal sebesar 0,100, nilai rata-rata variabel luas wilayah sebesar 0,029, nilai rata-rata variabel SiLPA sebesar 1,228, nilai rata-rata variabel pertumbuhan infrastruktur jalan sebesar -0,004.
5. Deviasi standart atau yang disebut juga nilai simpangan baku, yang mengukur rata-rata penyimpangan masing-masing item data terhadap nilai yang diharapkan. Deviasi standar dari variabel belanja modal sebesar 15,358 , pada variabel desentralisasi fiskal sebesar 0,076, pada variabel luas wilayah sebesar 0,295, pada variabel SiLPA sebesar 12,466, pada variabel pertumbuhan infrastruktur jalan sebesar 0,036.

B. Uji Pemilihan Model

Uji pemilihan model harus dilakukan sebelum memasuki tahap analisis regresi data panel untuk menentukan model yang paling sesuai dengan data yang akan diolah. Hasil uji pemilihan model regresi data panel adalah sebagai berikut :

1. Uji chow

Uji ini digunakan untuk mengetahui antara dua model yang dipilih untuk estimasi data, yaitu *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 4.8
Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 02/01/21 Time: 16:23
Sample: 2015 2019
Included observations: 5
Cross-sections included: 23
Total pool (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.168004	0.118934	1.412587	0.1606
X2?	0.035259	0.030221	1.166716	0.2458
X3?	1.232006	0.000717	1717.940	0.0000
X4?	0.060477	0.246329	0.245512	0.8065
C	0.109493	0.015087	7.257290	0.0000
R-squared	0.999963	Mean dependent var		1.640160
Adjusted R-squared	0.999962	S.D. dependent var		15.35802
S.E. of regression	0.095172	Akaike info criterion		-1.823750
Sum squared resid	0.996355	Schwarz criterion		-1.704405
Log likelihood	109.8656	Hannan-Quinn criter.		-1.775309
F-statistic	742126.0	Durbin-Watson stat		1.394898
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output Eviews 10

Tabel 4.9
Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 02/01/21 Time: 16:24
Sample: 2015 2019
Included observations: 5
Cross-sections included: 23
Total pool (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.088589	0.286511	0.309199	0.7579
X2?	0.055465	0.031371	1.768029	0.0805
X3?	1.232475	0.000711	1733.192	0.0000
X4?	0.008589	0.239162	0.035911	0.9714
C	0.116066	0.030028	3.865201	0.0002
Fixed Effects (Cross)				
_1—C	-0.064910			

_2—C	-0.015005
_3—C	0.021222
_4—C	-0.085641
_5—C	-0.012438
_6—C	-0.061760
_7—C	0.060325
_8—C	-0.014591
_9—C	0.009814
_10—C	-0.056047
_11—C	0.065614
_12—C	-0.039379
_13—C	0.044842
_14—C	-0.043406
_15—C	0.017324
_16—C	0.149340
_17—C	-0.008979
_18—C	-0.007328
_19—C	-0.094070
_20—C	0.063634
_21—C	0.069564
_22—C	0.025792
_23—C	-0.023914

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999976	Mean dependent var	1.640160
Adjusted R-squared	0.999969	S.D. dependent var	15.35802
S.E. of regression	0.085022	Akaike info criterion	-1.889844
Sum squared resid	0.636129	Schwarz criterion	-1.245382
Log likelihood	135.6660	Hannan-Quinn criter.	-1.628260
F-statistic	143063.6	Durbin-Watson stat	2.115704
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output Eviews 10

Setelah hasil dari model common effect dan fixed effect diperoleh maka selanjutnya dilakukan uji chow. Hasil dari uji chow dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Hasil dari Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Pool: DPANEL				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test		Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F		2.265116	(22,88)	0.0039
Cross-section Chi-square		51.600813	22	0.0004

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan hasil dari uji Chow pada Tabel 5.1, diketahui nilai probabilitas adalah 0,0004. Karena nilai probabilitas $0,0004 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. maka model estimasi yang digunakan adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk memilih model estimasi antara *Fixed Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Berhubung hasil regresi fixed effect sudah ada pada tabel 4. , maka berikut ini adalah hasil regresi dengan menggunakan model random effect :

Tabel 4.11
Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 02/01/21 Time: 16:25
Sample: 2015 2019
Included observations: 5
Cross-sections included: 23
Total pool (balanced) observations: 115
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.155355	0.150338	1.033366	0.3037
X2?	0.047222	0.028816	1.638724	0.1041
X3?	1.232257	0.000679	1814.287	0.0000
X4?	0.031897	0.230600	0.138321	0.8902
C	0.109991	0.019652	5.596841	0.0000
Random Effects (Cross)				
_1--C	-0.032846			
_2--C	-0.007932			
_3--C	0.011175			
_4--C	-0.049390			
_5--C	-0.007688			
_6--C	-0.035519			
_7--C	0.036257			
_8--C	-0.013982			
_9--C	0.006492			
_10--C	-0.030801			
_11--C	0.038526			
_12--C	-0.022021			
_13--C	0.027912			
_14--C	-0.024237			
_15--C	0.012488			
_16--C	0.088963			
_17--C	-0.005351			

_18--C	-0.004850		
_19--C	-0.054400		
_20--C	0.026607		
_21--C	0.041982		
_22--C	0.014153		
_23--C	-0.015539		
Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.045306	0.2212
Idiosyncratic random		0.085022	0.7788
Weighted Statistics			
R-squared	0.999967	Mean dependent var	1.054378
Adjusted R-squared	0.999966	S.D. dependent var	14.46567
S.E. of regression	0.084603	Sum squared resid	0.787349
F-statistic	833169.0	Durbin-Watson stat	1.730258
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.999963	Mean dependent var	1.640160
Sum squared resid	0.999175	Durbin-Watson stat	1.363442

Sumber : Output Eviews 10

Setelah hasil dari model fixed effect dan random effect diperoleh maka selanjutnya dilakukan uji hausman. Hasil dari uji hausman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Hasil dari Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Pool: DPANEL				
Test cross-section random effects				
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		2.919294	4	0.5714

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan hasil dari uji Hausman pada Tabel 5.2, diketahui nilai probabilitas adalah 0,5714. Karena nilai probabilitas $0,5714 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. maka model estimasi yang digunakan adalah model *Random Effect Model* (REM).

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian dengan Eviews atas data, maka hasil uji autokorelasi sebagai berikut :

Tabel 4.13
Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 01/31/21 Time: 21:12
Sample: 1 115
Included observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.168004	0.118934	1.412587	0.1606
X2	0.035259	0.030221	1.166716	0.2458
X3	1.232006	0.000717	1717.940	0.0000
X4	0.060477	0.246329	0.245512	0.8065
C	0.109493	0.015087	7.257290	0.0000
R-squared	0.999963	Mean dependent var		1.640160
Adjusted R-squared	0.999962	S.D. dependent var		15.35802
S.E. of regression	0.095172	Akaike info criterion		-1.823750
Sum squared resid	0.996355	Schwarz criterion		-1.704405
Log likelihood	109.8656	Hannan-Quinn criter.		-1.775309
F-statistic	742126.0	Durbin-Watson stat		1.371786
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output Eviews 10

Dari hasil uji autokorelasi pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 1,371786 . Maka jika $-2 < DW < 2$, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena dari data diatas didapat nilai durbin-witson adalah $-2 < 1,371786 < 2$.

2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian atas data, maka hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Breusch-Pagan sebagai berikut :

Tabel 4.14
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Breusch-Pagan

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.481092	Prob. F(4,110)	0.7496
Obs*R-squared	1.977249	Prob. Chi-Square(4)	0.7399
Scaled explained SS	8.734244	Prob. Chi-Square(4)	0.0681

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Breusch-Pagan dapat dilihat bahwa nilai Prob. pada baris *Obs*R-squared* sebesar 0,7399. Nilai ini menyatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas karena memiliki nilai Prob. pada baris *Obs*R-squared* $> 0,05$ yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian dengan Eviews atas data, maka hasil uji multikolinearitas sebagai berikut :

Tabel 4.15
Uji Multikolinearitas dengan VIF

Variable	Centered VIF
X1	1.019607
X2	1.001545
X3	1.005954
X4	1.013058
C	NA

Sumber : Output Eviews 10

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas, terlihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* pada desentralisasi fiskal sebesar 1,019. Pada luas wilayah sebesar 1,001. Pada SiLPA sebesar 1,005 dan pada pertumbuhan infrastruktur jalan sebesar 1,013. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi multikolinearitas pada data tersebut karena $VIF < 10$.

D. Analisis Regresi Panel

Penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen (Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan) dan 1 variabel dependen (Belanja Modal), sehingga menggunakan persamaan regresi panel.

Berdasarkan analisis regresi panel dengan eviews 10 diperoleh hasil *Random Effect Model* sebagai berikut :

Tabel 4.16
Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 02/01/21 Time: 16:25
Sample: 2015 2019
Included observations: 5
Cross-sections included: 23
Total pool (balanced) observations: 115
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.155355	0.150338	1.033366	0.3037
X2?	0.047222	0.028816	1.638724	0.1041
X3?	1.232257	0.000679	1814.287	0.0000
X4?	0.031897	0.230600	0.138321	0.8902
C	0.109991	0.019652	5.596841	0.0000

Sumber : Output Eviews 10

Dari tabel diatas, diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut :

$$\mathbf{BM = 0,109 + 0,155 DF + 0,047 LW + 1,232 SiLPA + 0,031 PIJ + \varepsilon}$$

Dari persamaan regresi panel diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai constanta sebesar 0,109, hal ini menunjukkan bahwa apabila desentralisasi fiskal, luas wilayah, SiLPA, dan pertumbuhan infrastruktur bernilai 0 atau ditiadakan, maka nilai alokasi belanjamodalnya adalah sebesar 0,109 atau 10,9% .
2. Desentralisasi fiskal menunjukkan koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,155, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% desentralisasi fiskal akan mengakibatkan kenaikan belanja modal sebesar 15,5%.
3. Luas wilayah menunjukkan koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,047, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% luas wilayah akan mengakibatkan kenaikan belanja modal sebesar 4,7%
4. SiLPA menunjukkan koefisien regresi dengan arah positif sebesar 1,232, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% SiLPA akan mengakibatkan kenaikan belanja modal sebesar 123,2%.

5. Pertumbuhan infrastruktur jalan menunjukkan koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,031, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pertumbuhan infrastruktur jalan akan mengakibatkan kenaikan belanja modal sebesar 3,1%.

E. Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Maka hasil Uji t (parsial) sebagai berikut :

Tabel 4.17
Uji t (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.155355	0.150338	1.033366	0.3037
X2?	0.047222	0.028816	1.638724	0.1041
X3?	1.232257	0.000679	1814.287	0.0000
X4?	0.031897	0.230600	0.138321	0.8902
C	0.109991	0.019652	5.596841	0.0000

Sumber : Output Eviews 10

Hasil uji t (parsial) pada tabel diatas, dapat dilihat nilai t_{hitung} dari masing-masing variabel, nilai tabel yang diperoleh dengan $n-k = 115-5 = 110$ yaitu 1,9817, dengan kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 5\%$ (0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan masing-masing variabel sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial antara desentralisasi fiskal terhadap alokasi belanja modal diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu ($1,033366 < 1,9817$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,3037 yang lebih besar dari 0,05 . maka H_a ditolak dan H_0 diterima , berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Desentralisasi Fiskal terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

- b. Dari hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil t-hitung untuk variabel independen untuk variabel luas wilayah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,638724 , sementara nilai t-tabel adalah sebesar 1,9817 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ($1,638724 < 1,9817$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,1041 yang lebih besar dari 0,05. maka H_a ditolak dan H_0 diterima . Dengan demikian maka luas wilayah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Dari hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil t-hitung untuk variabel independen untuk variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1.814,287, sementara nilai t-tabel adalah sebesar 1,9817 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($1.814,287 > 1,9817$) kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
- d. Dari hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil t-hitung untuk variabel independen untuk variabel pertumbuhan infrastruktur jalan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,138321 , sementara nilai t-tabel adalah sebesar 1,9817 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ($0,138321 < 1,9817$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,8902 yang lebih besar dari 0,05. maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Infrastruktur

Jalan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. Uji F (Simultan)

Maka hasil uji F (simultan) sebagai berikut:

Tabel 4.18
Uji F (Uji Simultan)

R-squared	0.999967	Mean dependent var	1.054378
Adjusted R-squared	0.999966	S.D. dependent var	14.46567
S.E. of regression	0.084603	Sum squared resid	0.787349
F-statistic	833169.0	Durbin-Watson stat	1.730258
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan hasil uji simultan antara variabel desentralisasi fiskal, luas wilayah, SiLPA, dan pertumbuhan infrastruktur jalan terhadap alokasi belanja modal diatas, di peroleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $(833.169,0) > (2,45)$, dengan nilai *Prob. (F-statistics)* yakni $(0,000) < (0,05)$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikansi secara simultan antara variabel desentralisasi fiskal, luas wilayah, SiLPA, dan pertumbuhan infrastruktur jalan terhadap alokasi belanja modal.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Maka hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada nilai *R square* sebagai berikut :

Tabel 4.19
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.999967	Mean dependent var	1.054378
Adjusted R-squared	0.999966	S.D. dependent var	14.46567
S.E. of regression	0.084603	Sum squared resid	0.787349
F-statistic	833169.0	Durbin-Watson stat	1.730258
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output Eviews 10

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R square sebesar 0.999966, yang berarti bahwa Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi belanja modal sebesar 99,99%, sisanya sebesar 0,01% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

F. Interpretasi Hasil Penelitian

1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil t-hitung untuk variabel independen Desentralisasi Fiskal adalah sebesar 1,033366, sementara nilai t-tabel dengan $\alpha = 5\%$ (0,05 dan $df = (n-k) = 115-5 = 110$ yaitu 1,9817. Yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ($1,033366 < 1,9817$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,3037 yang lebih besar dari 0,05 . maka H_a ditolak dan H_0 diterima , berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Desentralisasi Fiskal terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan hipotesis yang penukis kemukakan sebelum dilakukannya penelitian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara belum mampu untuk mengoptimalkan potensi sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena dalam desentralisasi fiskal masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah dan mengoptimalkan sumber daya daerah yang ada. Dana transfer yang diterima pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja rutin, dan belanja operasional lainnya, sehingga menyebabkan alokasi belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah masing-masing, sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang efisien dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lambat.

Tidak ditemukannya hubungan antara desentralisasi fiskal dan alokasi belanja modal disebabkan karena rendahnya proksi dari PAD dan Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak yang dialokasikan ke dalam Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Pada bagian latar belakang telah dijelaskan bahwa pada tahun 2015-2019 menunjukkan rata-rata setiap tahunnya belanja modal dibawah 30%, yaitu lebih rendah daripada belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Hal ini belum memenuhi target dalam RPJMN tahun 2015-2019 dimana secara keseluruhan belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya adalah 30% dari belanja daerah. Jadi pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara belum mengoptimalkan PAD dan DBH yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat untuk dialokasikan kedalam belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ferdian Putra (2017) yang menunjukkan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dan juga penelitian lain yang dilakukan Badrudin (2011) yang juga menunjukkan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.⁹⁸

2. Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Dari hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil t-hitung untuk variabel independen untuk variabel luas wilayah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,638724, sementara nilai t-tabel adalah sebesar 1,9817 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ($1,638724 < 1,9817$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,1041 yang lebih besar dari 0,05. maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian maka luas wilayah tidak berpengaruh

⁹⁸Ferdian Putra, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal," (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2017), h.15-16.

terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan hipotesis yang penukis kemukakan sebelum dilakukannya penelitian.

Hal ini bisa dilihat bahwa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara daerah yang lebih luas belum tentu belanja modalnya juga semakin besar. Masih banyak daerah-daerah yang memiliki luas wilayah yang cukup besar, akan tetapi daerah tersebut terdapat lebih banyak daerah pertanian apabila dibandingkan dengan daerah pemerintahannya, seperti pusat kota dll. Sebaliknya, banyak juga terdapat daerah yang cenderung lebih sempit luas wilayahnya, akan tetapi daerah tersebut kebanyakan didominasi oleh pusat kota dan pemerintahan yang tentunya akan membutuhkan lebih banyak belanja modal untuk mendanai daerah tersebut. Hal itu berarti bahwa dalam manajemen pengeluaran pemerintah daerah yang terkait dengan alokasi belanja modal, luas wilayah tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal.

Contohnya kabupaten Mandailing Natal belanja modalnya lebih kecil daripada kabupaten Deli Serdang, padahal jika dilihat dari luas wilayahnya Mandailing Natal memiliki luas yg lebih luas daripada luas kabupaten Deli Serdang. Dan juga belanja modal kota Binjai lebih besar dibandingkan dengan belanja modal kota Gunung Sitoli yang apabila dilihat dari luas wilayahnya kota Gunung Sitoli jauh lebih luas daripada kota Binjai. Hal tersebut membuktikan bahwa daerah yang mempunyai wilayah yang cukup luas belum tentu akan memakan biaya pembangunan yang cukup besar dan juga sebaliknya daerah yang memiliki luas wilayah tidak begitu luas alokasi belanja modalnya akan lebih sedikit.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan Suci Rohini (2019) yang menyatakan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di

Sumatera Utara. Dan juga penelitian yang dilakukan Junaedy (2016) dengan hasil bahwa luas wilayah tidak berpengaruh dengan arah negatif terhadap alokasi belanja modal.⁹⁹

3. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Dari hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil t-hitung untuk variabel independen untuk variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1.814,287, sementara nilai t-tabel adalah sebesar 1,9817 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($1.814,287 > 1,9817$) kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum dilakukannya penelitian ini. Yang menunjukkan bahwa semakin besar SiLPA yang terdapat di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara maka semakin besar pula belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, menandai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan menandai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Besarnya porsi SILPA tahun lalu dalam struktur penerimaan pembiayaan dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja di tahun berikutnya.

⁹⁹Suci Rohini, "Pengaruh Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Y periode 2015-2017)", h.60-61

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa SILPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, terbentuknya SILPA tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan untuk pembiayaan pada periode berikutnya. SILPA terjadi apabila realisasi pendapatan lebih besar melampaui dari yang direncanakan, atau terjadi penghematan pada pos belanja dan transfer. Semakin tinggi SILPA memungkinkan penggunaan belanja daerah semakin besar salah satunya belanja langsung.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang menunjukkan hasil bahwa SILPA berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Penelitian yang lain menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh terhadap alokasi belanja modal adalah penelitian Suci Rohini.

4. Pengaruh Pertumbuhan Infrastruktur Jalan Terhadap Alokasi Belanja Modal

Dari hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil t-hitung untuk variabel independen untuk variabel pertumbuhan infrastruktur jalan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,138321, sementara nilai t-tabel adalah sebesar 1,9817 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ($0,138321 < 1,9817$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,8902 yang lebih besar dari 0,05. maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Infrastruktur Jalan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum dilakukannya penelitian. Ini dikarenakan nilai rasio pertumbuhan infrastruktur jalan yang rendah, karena dari tahun 2015-2019 tidak ada pertumbuhan panjang jalan yang banyak, bahkan sama sekali tidak ada terjadi

pertumbuhan pada tahun 2016, tahun 2018 dan juga tahun 2019 pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Dan juga sama halnya dengan luas wilayah bahwa pertumbuhan infrastruktur jalan tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal. Hal itu disebabkan oleh sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhi, yaitu proses penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) pada kabupaten/kota di Sumatera Utara yang alokasi belanja modalnya lebih diarahkan kepada belanja pegawai dan belanja operasional lainnya.

Contohnya daerah kabupaten Gunungsitoli pertumbuhan infrastruktur jalannya dari tahun 2016 sebesar 0,0000 menjadi 0,0668 pada tahun 2017, tidak membuat rasio belanja modal dari tahun 2016 sebesar 0,2691 menjadi naik pada tahun 2017, justru malah mengalami penurunan menjadi sebesar 0,2580. Begitu juga pada Labuhanbatu Selatan pertumbuhan infrastruktur jalannya dari tahun 2016 sebesar 0,0000 menjadi 0,0801 pada tahun 2017, juga tidak membuat rasio belanja modal dari tahun 2016 yang sebesar 0,3014 menjadi naik pada tahun 2017, justru malah mengalami penurunan juga menjadi hanya sebesar 0,2589.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajri (2016) yang menyatakan belanja modal tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. Tidak signifikansinya pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Sumatera menunjukkan juga bahwa kurang tepatnya pengalokasian belanja modal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian data tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara) maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil t-hitung untuk variabel independen Desentralisasi Fiskal adalah sebesar 1,033366, sementara nilai t-tabel dengan $\alpha = 5\%$ (0,05 dan $df = (n-k) = 115-5 = 110$ yaitu 1,9817. Yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ($1,033366 < 1,9817$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,3037 yang lebih besar dari 0,05 . maka H_a ditolak dan H_0 diterima , berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Desentralisasi Fiskal terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Dari hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil t-hitung untuk variabel independen untuk variabel luas wilayah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,638724 , sementara nilai t-tabel adalah sebesar 1,9817 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ($1,638724 < 1,9817$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,1041 yang lebih besar dari 0,05. maka H_a ditolak dan H_0 diterima . Dengan demikian maka luas wilayah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Dari hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil t-hitung untuk variabel independen untuk variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1.814,287,

sementara nilai t-tabel adalah sebesar 1,9817 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($1.814,287 > 1,9817$) kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

4. Dari hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil t-hitung untuk variabel independen untuk variabel pertumbuhan infrastruktur jalan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,138321 , sementara nilai t-tabel adalah sebesar 1,9817 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ($0,138321 < 1,9817$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,8902 yang lebih besar dari 0,05. maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Infrastruktur Jalan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
5. Berdasarkan hasil uji simultan antara variabel desentralisasi fiskal, luas wilayah, SiLPA, dan pertumbuhan infrastruktur jalan terhadap alokasi belanja modal diatas, di peroleh nilai F_{hitung} sebesar 833.169,0 sementara nilai t-tabel adalah sebesar 1,9817 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($833.169,0 > 1,9817$) kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi secara simultan antara variabel desentralisasi fiskal, luas wilayah, SiLPA, dan pertumbuhan infrastruktur jalan terhadap alokasi belanja modal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran dengan harapan mampu menjadi penambah informasi bagi pihak yang berkepentingan atau bagi peneliti yang akan datang, sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara agar lebih meningkatkan kinerja keuangan daerah karena memberikan dampak terhadap peningkatan alokasi belanja modal yang merupakan cerminan pembangunan daerah.
- b. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebaiknya lebih memperhatikan pengalokasian belanja modal di tahun-tahun yang akan datang seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara agar lebih mengoptimalkan lagi pemanfaatan PAD dan SiLPA dengan tidak menggunakan sebagian besar untuk biaya pegawai saja tetapi juga digunakan untuk mendorong kemajuan di daerah. Serta pemerintah daerah diharapkan juga menggunakannya secara efisien agar pelayanan masyarakat dapat tercipta dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota bisa mengalokasikan ke belanja modal agar dana yang di peroleh untuk belanja modal akan meningkat sehingga pembangunan terhadap infrastruktur juga meningkat.
- e. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang selain desentralisasi fiskal, luas wilayah, dan infrastruktur pertumbuhan jalan yang pada penelitian ini koefisien pengaruhnya sangat kecil pada pengalokasian belanja modal. Dan lebih mengembangkan variabel independen yang lain misalnya seperti Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Advernesia. "Pengertian Data Kuantitatif dan Kualitatif serta Contohnya", diakses pada tanggal 23 Desember 2019 dari <https://www.advernesia.com/blog/data-science/pengertian-data-kuantitatif-dan-kualitatif-serta-contohnya/>
- Ainun Jariyah. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah)*. Naskah Publikasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Akmal, Azhari Tarigan, Isnaini Harahap, Andri Soemitra, Zuhrial M. Nawawi, Ahmad Syakir, dan Yusrizal. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La Tansa Press, 2012
- Annisa Amalia Fairuz, *Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas, Rasio Pasar, Inflasi Dan Kurs Terhadap Return Saham Syariah (Studi Pada Saham Syariah Yang Tergabung Dalam Kelompok ISSI Pada Sektor Industri Tahun 2011-2015)* Skripsi. Jakarta: Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017
- Ardhini dan Handayani, "Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Keagenan," dalam Ferdian Putra, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang, 2017.
- Arif Purnama. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013*. Naskah Publikasi. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

- Badan Pusat Statistik, "Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2015-2016" Buku 1 Sumatera Jawa, Manuskrip Subdirektorat Statistik Keuangan, No. 06310.1702
- Baiq Nanda Aulia, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Yield To Maturity Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Sukuk Yang Beredar Di Bursa Efek Inonesia Periode 2015-2016*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- Cahyani Nurlaela dan Nur Hidayati. *Pengaruh Desentralisasi, Luas Wilayah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur)*. E-JRA Vol. 07 No. 11 Agustus, 2018 .
- Dedi Suprianto. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Nagan Raya*. Skripsi S1. Meulaboh: Universitas Teuku Umar, 2016.
- Diah Sulistyowati. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*. Skripsi S1. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Edy Meianto, Betri, dan Cherrya Dhia Wenny. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*. Palembang: STIE Multi Data Palembang, 2012.
- Ferdian Putra. *Pengaruh Desentralisasi, Luas Wilayah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2014)*. Skripsi S1. Padang : Universitas Negeri Padang, 2017.
- Guntur Hendriwiyanto., *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi*, Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya, 2014.

- Ikhsan, Arfan, Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung dan Ayu Oktaviani. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka, 2014.
- Junaedy. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Future Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua, 2015.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Desentralisasi Fiskal : Politik Dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-1. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Aceh)*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2, No.2, Mei 2013.
- Mayang Sari Nasution. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)*. Skripsi S1. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- M.Rasuli dan Alfiati Silfi, “*Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*”. Skripsi. Universitas Riau.

- Musgrave A. Richard and Musgrave B. Peggy, *KEUANGAN NEGARA DALAM TEORI DAN PRAKTEK EDISI KELIMA*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Pungky Ardhani, “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*”. Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Putra, Windhu. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2018
- Putri Retno Aryani. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/KotA Di Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi S1. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017.
- Rita Devi Setiyani. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Studi Empiris Pada Kabupaten Di Karesidenan Pati Periode 2009-2013*. Skripsi S1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Robin Keswando, Suharno, dan Djoko Kristianto. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Studi Empiris Di Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12 No. 1 Maret 2016:1-7.
- Rudy Badrudin. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. Disertasi. Surabaya: Universitas Airlangga, 2012.
- Seri Jefri Adil Waruwu, “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995-2014*”, (Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2016.

Siti Fatimah Nurhayati, “*Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal*”, dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 2, No. 1, Juni 2001: 14-28

Suci Rohini, “*Pengaruh Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Y periode 2015-2017)*”. Skripsi. IAIN Surakarta, 2019.

Widjaja, H.A.W. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Yolanda Wulandari. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia*. Skripsi S1. Padang:Universitas Negeri Padang,2014.

Yuwono, Sony.,Tengku Agus Indrajaya dan Hariyandi. *Penganggaran Sektor Publik : Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Malang: Bayu Media, 2005.

Zupi Andriyani Sagala, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Alam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

<https://m.bisnis.com/read/20190617/10/934374/tren-apbn-alokasi-belanja-modal-rendah>

<https://tafsirweb.com/2276-surat-al-anam-ayat-152.html>

<https://tafsirweb.com/6323-surat-al-furqan-ayat-67.html>.

<http://www.bpkp.go.id/sumut/konten/236/>

www.bps.go.id

www.djpk.kemenkeu.go.id

Lampiran.1 Data Laporan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabulasi Data Belanja Modal

Kabupaten/Kota	BELANJA MODAL				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Toba Samosir	164.9031	0.1431	0.1617	0.1253	0.1205
Kab. Mandailing Natal	0.1758	0.1554	0.1711	0.1245	0.1294
Kab. Labuhanbatu	0.2075	0.1997	0.2388	0.2287	0.2250
Kab. Nias	0.2857	0.3076	0.2626	0.2257	0.1186
Kab. Simalungun	0.1557	0.0668	0.0837	0.2401	0.1582
Kab. Dairi	0.1434	0.2030	0.2030	0.1355	0.1542
Kab. Labuhanbatu Selatan	0.2478	0.3014	0.2589	0.2581	0.2109
Kab. Deli Serdang	0.2710	0.2164	0.1851	0.1852	0.2212
Kab. Tapanuli Tengah	0.1930	0.2081	0.1578	0.2402	0.1496
Kab. Humbang Hasundutan	0.2085	0.2351	0.2186	0.1762	0.1984
Kab. Tapanuli Selatan	0.2542	0.2572	0.2107	0.2290	0.2359
Kab. Tapanuli Utara	0.1660	0.1969	0.0770	0.1313	0.1452
Kab. Samosir	0.2190	0.2755	0.2784	0.2152	0.2072
Kab. Batu Bara	0.2256	0.2236	0.1539	0.1430	0.1753
Kab. Padang Lawas Utara	0.2490	0.2282	0.2420	0.1812	0.1982
Kab. Nias utara	0.3585	0.3593	0.3589	0.2643	0.2788
Kota Sibolga	0.2084	0.2867	0.1961	0.2059	0.1371
Kota Padang Sidempuan	0.1319	0.1218	0.2068	0.1307	0.1578
Kota Tanjung Balai	0.1621	0.1741	0.2011	0.3199	0.2847
Kota Medan	0.2215	0.2212	0.2463	0.2143	0.2012
Kota Gunung Sitoli	0.2915	0.2691	0.2580	0.3740	0.3272
Kota Binjai	0.1882	0.2117	0.1975	0.2210	0.0902
Kota Pematang Siantar	0.1213	0.1739	0.2604	0.2429	0.2285

Tabulasi Data Desentralisasi Fiskal

Kabupaten/Kota	DESENTRALISASI FISKAL				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Toba Samosir	0.0416	0.0366	0.0380	0.0410	0.0657
Kab. Mandailing Natal	0.0561	0.0513	0.0613	0.0747	0.0916
Kab. Labuhanbatu	0.1226	0.1240	0.1124	0.1208	0.1514
Kab. Nias	0.0974	0.0729	0.0815	0.0878	0.1168
Kab. Simalungun	0.0536	0.0578	0.0974	0.1893	0.1070
Kab. Dairi	0.0678	0.0671	0.0574	0.0846	0.0878
Kab. Labuhanbatu Selatan	0.0567	0.0445	0.0454	0.0590	0.1314
Kab. Deli Serdang	0.1931	0.1881	0.1846	0.2635	0.3066
Kab. Tapanuli Tengah	0.0532	0.0535	0.0649	0.0813	0.1109
Kab. Humbang Hasundutan	0.0364	0.0363	0.0414	0.0599	0.0774
Kab. Tapanuli Selatan	0.0846	0.0731	0.0683	0.0868	0.1964
Kab. Tapanuli Utara	0.0478	0.0491	0.0765	0.0787	0.1059
Kab. Samosir	0.0386	0.0345	0.0514	0.0602	0.0820
Kab. Batu Bara	0.0492	0.0510	0.0473	0.0577	0.0963
Kab. Padang Lawas Utara	0.0381	0.0282	0.0284	0.0434	0.0612
Kab. Nias utara	0.0674	0.0328	0.0384	0.0868	0.0329
Kota Sibolga	0.2660	0.0741	0.1207	0.1582	0.1973
Kota Padang Sidempuan	0.0940	0.0829	0.1099	0.1082	0.1306
Kota Tanjung Balai	0.0802	0.0834	0.0859	0.0666	0.1219
Kota Medan	0.3310	0.3288	0.3449	0.3731	0.4163
Kota Gunung Sitoli	0.0690	0.0361	0.0467	0.0349	0.0480
Kota Binjai	0.0905	0.0836	0.1029	0.1395	0.1876
Kota Pematang Siantar	0.1247	0.1067	0.0969	0.1261	0.1314

Tabulasi Data Luas Wilayah

Kabupaten/Kota	LUAS WILAYAH				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Toba Samosir	0.0000	-0.0100	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Mandailing Natal	0.0000	-0.0735	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Labuhanbatu	0.0000	-0.1583	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Nias	0.0000	0.8795	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Simalungun	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Dairi	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Labuhanbatu Selatan	0.0000	0.1540	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Deli Serdang	0.0000	-0.0983	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Tapanuli Tengah	0.0000	0.0139	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Humbang Hasundutan	0.0000	0.0166	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Tapanuli Selatan	0.0000	0.3854	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Tapanuli Utara	0.0000	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Samosir	0.0000	-0.1498	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Batu Bara	0.0000	0.0191	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Padang Lawas Utara	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Nias utara	0.0000	-0.1990	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Sibolga	0.0000	2.8357	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Padang Sidempuan	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Tanjung Balai	0.0000	0.7528	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Medan	0.0000	-0.0004	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Gunung Sitoli	0.0000	-0.4018	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Binjai	0.0000	-0.3441	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Pematang Siantar	0.0000	-0.3040	0.0000	0.0000	0.0000

Tabulasi Data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Kabupaten/Kota	SiLPA				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Toba Samosir	133.7515	0.0719	0.0964	0.0516	0.0506
Kab. Mandailing Natal	0.1010	0.0516	0.0083	0.0064	0.0155
Kab. Labuhanbatu	0.0377	0.0947	0.0134	0.0999	0.0520
Kab. Nias	0.2024	0.1583	0.1438	0.2349	0.0386
Kab. Simalungun	0.0489	0.0548	0.0095	0.0003	0.0014
Kab. Dairi	0.1091	0.1271	0.1258	0.0346	0.0377
Kab. Labuhanbatu Selatan	0.0786	0.0753	0.0407	0.0438	0.0505
Kab. Deli Serdang	0.0480	0.0733	0.0569	0.1075	0.1008
Kab. Tapanuli Tengah	0.1060	0.0577	0.0354	0.0126	0.0206
Kab. Humbang Hasundutan	0.1693	0.1456	0.1288	0.0689	0.0675
Kab. Tapanuli Selatan	0.0331	0.0443	0.0342	0.0240	0.0367
Kab. Tapanuli Utara	0.1188	0.0427	0.0305	0.0342	0.0187
Kab. Samosir	0.1594	0.0870	0.0355	0.0060	0.0174
Kab. Batu Bara	0.1417	0.0935	0.0811	0.0891	0.0249
Kab. Padang Lawas Utara	0.1491	0.1005	0.0335	0.0268	0.0268
Kab. Nias utara	0.1223	0.0558	0.0167	0.0025	0.0306
Kota Sibolga	0.1264	0.0289	0.0539	0.0017	0.0075
Kota Padang Sidempuan	0.0577	0.0067	0.0293	0.0167	0.0184
Kota Tanjung Balai	0.1407	0.1054	0.4901	0.0313	0.0042
Kota Medan	0.0001	0.0066	0.0080	0.0066	0.0163
Kota Gunung Sitoli	0.2155	0.1693	0.0601	0.0126	0.0233
Kota Binjai	0.0552	0.0177	0.0499	0.0005	0.0118
Kota Pematang Siantar	0.0725	0.1517	0.0804	0.0351	0.0908

Tabulasi Data Pertumbuhan Insfrastruktur Jalan

Kabupaten/Kota	PANJANG JALAN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Toba Samosir	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Mandailing Natal	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000
Kab. Labuhanbatu	0.0000	0.0000	-0.0911	-0.0001	0.0000
Kab. Nias	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Simalungun	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Dairi	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Labuhanbatu Selatan	0.0000	0.0000	0.0801	0.0000	0.0000
Kab. Deli Serdang	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Tapanuli Tengah	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Humbang Hasundutan	0.0000	0.0000	-0.1678	0.0000	0.0000
Kab. Tapanuli Selatan	0.0000	0.0000	-0.0277	0.0000	0.0000
Kab. Tapanuli Utara	0.0000	0.0000	0.0000	-0.1139	0.0000
Kab. Samosir	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0965	0.0000
Kab. Batu Bara	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kab. Padang Lawas Utara	0.0000	0.0000	-0.1139	0.0000	0.0000
Kab. Nias utara	0.0000	0.0000	0.0781	-0.0726	0.0000
Kota Sibolga	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Padang Sidempuan	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Tanjung Balai	0.0000	0.0000	0.0160	0.0152	0.0000
Kota Medan	0.0000	0.0000	0.0869	0.0000	0.0000
Kota Gunung Sitoli	0.0000	0.0000	0.0668	0.0000	0.0000
Kota Binjai	0.0000	0.0000	-0.2109	0.0215	0.0000
Kota Pematang Siantar	0.0000	0.0000	0.0000	0.0730	0.0000

Lampiran.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal (Y)	115	0,067	164,903	1,640	15,358
Desentralisasi Fiskal (X1)	115	0,028	0,416	0,100	0,076
Luas Wilayah (X2)	115	-0,402	2,836	0,029	0,295
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)	115	0,000	133,752	1,228	12,466
Pertumbuhan Infrastruktur Jalan (X4)	115	-0,211	0,087	-0,004	0,036

Lampiran.3 Hasil Uji Model Regresi

Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: Y?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 02/01/21 Time: 16:23
 Sample: 2015 2019
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 23
 Total pool (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.168004	0.118934	1.412587	0.1606
X2?	0.035259	0.030221	1.166716	0.2458
X3?	1.232006	0.000717	1717.940	0.0000
X4?	0.060477	0.246329	0.245512	0.8065
C	0.109493	0.015087	7.257290	0.0000
R-squared	0.999963	Mean dependent var	1.640160	
Adjusted R-squared	0.999962	S.D. dependent var	15.35802	
S.E. of regression	0.095172	Akaike info criterion	-1.823750	
Sum squared resid	0.996355	Schwarz criterion	-1.704405	
Log likelihood	109.8656	Hannan-Quinn criter.	-1.775309	
F-statistic	742126.0	Durbin-Watson stat	1.394898	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: Y?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 02/01/21 Time: 16:24
 Sample: 2015 2019
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 23
 Total pool (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.088589	0.286511	0.309199	0.7579
X2?	0.055465	0.031371	1.768029	0.0805
X3?	1.232475	0.000711	1733.192	0.0000
X4?	0.008589	0.239162	0.035911	0.9714
C	0.116066	0.030028	3.865201	0.0002
Fixed Effects (Cross)				
_1—C	-0.064910			
_2—C	-0.015005			
_3—C	0.021222			
_4—C	-0.085641			
_5—C	-0.012438			
_6—C	-0.061760			
_7—C	0.060325			

_8—C	-0.014591
_9—C	0.009814
_10—C	-0.056047
_11—C	0.065614
_12—C	-0.039379
_13—C	0.044842
_14—C	-0.043406
_15—C	0.017324
_16—C	0.149340
_17—C	-0.008979
_18—C	-0.007328
_19—C	-0.094070
_20—C	0.063634
_21—C	0.069564
_22—C	0.025792
_23—C	-0.023914

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999976	Mean dependent var	1.640160
Adjusted R-squared	0.999969	S.D. dependent var	15.35802
S.E. of regression	0.085022	Akaike info criterion	-1.889844
Sum squared resid	0.636129	Schwarz criterion	-1.245382
Log likelihood	135.6660	Hannan-Quinn criter.	-1.628260
F-statistic	143063.6	Durbin-Watson stat	2.115704
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 02/01/21 Time: 16:25
Sample: 2015 2019
Included observations: 5
Cross-sections included: 23
Total pool (balanced) observations: 115
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.155355	0.150338	1.033366	0.3037
X2?	0.047222	0.028816	1.638724	0.1041
X3?	1.232257	0.000679	1814.287	0.0000
X4?	0.031897	0.230600	0.138321	0.8902
C	0.109991	0.019652	5.596841	0.0000
Random Effects (Cross)				
_1--C	-0.032846			
_2--C	-0.007932			
_3--C	0.011175			
_4--C	-0.049390			
_5--C	-0.007688			
_6--C	-0.035519			

_7--C	0.036257
_8--C	-0.013982
_9--C	0.006492
_10--C	-0.030801
_11--C	0.038526
_12--C	-0.022021
_13--C	0.027912
_14--C	-0.024237
_15--C	0.012488
_16--C	0.088963
_17--C	-0.005351
_18--C	-0.004850
_19--C	-0.054400
_20--C	0.026607
_21--C	0.041982
_22--C	0.014153
_23--C	-0.015539

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.045306	0.2212
Idiosyncratic random		0.085022	0.7788
Weighted Statistics			
R-squared	0.999967	Mean dependent var	1.054378
Adjusted R-squared	0.999966	S.D. dependent var	14.46567
S.E. of regression	0.084603	Sum squared resid	0.787349
F-statistic	833169.0	Durbin-Watson stat	1.730258
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.999963	Mean dependent var	1.640160
Sum squared resid	0.999175	Durbin-Watson stat	1.363442

Uji Chow (CEM v/s FEM)

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: DPANEL
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.265116	(22,88)	0.0039
Cross-section Chi-square	51.600813	22	0.0004

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y?
Method: Panel Least Squares
Date: 02/01/21 Time: 16:26

Sample: 2015 2019
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 23
 Total pool (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.168004	0.118934	1.412587	0.1606
X2?	0.035259	0.030221	1.166716	0.2458
X3?	1.232006	0.000717	1717.940	0.0000
X4?	0.060477	0.246329	0.245512	0.8065
C	0.109493	0.015087	7.257290	0.0000
R-squared	0.999963	Mean dependent var		1.640160
Adjusted R-squared	0.999962	S.D. dependent var		15.35802
S.E. of regression	0.095172	Akaike info criterion		-1.823750
Sum squared resid	0.996355	Schwarz criterion		-1.704405
Log likelihood	109.8656	Hannan-Quinn criter.		-1.775309
F-statistic	742126.0	Durbin-Watson stat		1.394898
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Hausman (FEM v/s REM)

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Pool: DPANEL
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.919294	4	0.5714

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1?	0.088589	0.155355	0.059487	0.7843
X2?	0.055465	0.047222	0.000154	0.5062
X3?	1.232475	1.232257	0.000000	0.3002
X4?	0.008589	0.031897	0.004022	0.7132

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 02/01/21 Time: 16:27

Sample: 2015 2019

Included observations: 5

Cross-sections included: 23

Total pool (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.116066	0.030028	3.865201	0.0002

X1?	0.088589	0.286511	0.309199	0.7579
X2?	0.055465	0.031371	1.768029	0.0805
X3?	1.232475	0.000711	1733.192	0.0000
X4?	0.008589	0.239162	0.035911	0.9714

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999976	Mean dependent var	1.640160
Adjusted R-squared	0.999969	S.D. dependent var	15.35802
S.E. of regression	0.085022	Akaike info criterion	-1.889844
Sum squared resid	0.636129	Schwarz criterion	-1.245382
Log likelihood	135.6660	Hannan-Quinn criter.	-1.628260
F-statistic	143063.6	Durbin-Watson stat	2.115704
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran.4 Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 01/31/21 Time: 21:12				
Sample: 1 115				
Included observations: 115				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.168004	0.118934	1.412587	0.1606
X2	0.035259	0.030221	1.166716	0.2458
X3	1.232006	0.000717	1717.940	0.0000
X4	0.060477	0.246329	0.245512	0.8065
C	0.109493	0.015087	7.257290	0.0000
R-squared	0.999963	Mean dependent var		1.640160
Adjusted R-squared	0.999962	S.D. dependent var		15.35802
S.E. of regression	0.095172	Akaike info criterion		-1.823750
Sum squared resid	0.996355	Schwarz criterion		-1.704405
Log likelihood	109.8656	Hannan-Quinn criter.		-1.775309
F-statistic	742126.0	Durbin-Watson stat		1.371786
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran.5 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Breusch-Pagan

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey				
F-statistic	0.481092	Prob. F(4,110)		0.7496
Obs*R-squared	1.977249	Prob. Chi-Square(4)		0.7399
Scaled explained SS	8.734244	Prob. Chi-Square(4)		0.0681
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 01/31/21 Time: 21:21				
Sample: 1 115				
Included observations: 115				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.012430	0.004326	2.873282	0.0049
X1	-0.032994	0.034103	-0.967481	0.3354
X2	-0.003334	0.008666	-0.384681	0.7012
X3	-7.62E-05	0.000206	-0.370411	0.7118
X4	0.070122	0.070633	0.992763	0.3230
R-squared	0.017193	Mean dependent var		0.008664
Adjusted R-squared	-0.018545	S.D. dependent var		0.027041
S.E. of regression	0.027290	Akaike info criterion		-4.322082
Sum squared resid	0.081922	Schwarz criterion		-4.202737
Log likelihood	253.5197	Hannan-Quinn criter.		-4.273640
F-statistic	0.481092	Durbin-Watson stat		1.794682
Prob(F-statistic)	0.749557			

Lampiran.6 Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 01/31/21 Time: 21:18			
Sample: 1 115			
Included observations: 115			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	0.014145	2.813960	1.019607
X2	0.000913	1.011239	1.001545
X3	5.14E-07	1.015803	1.005954
X4	0.060678	1.025208	1.013058
C	0.000228	2.890015	NA

Lampiran.7 Analisis Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.155355	0.150338	1.033366	0.3037
X2?	0.047222	0.028816	1.638724	0.1041
X3?	1.232257	0.000679	1814.287	0.0000
X4?	0.031897	0.230600	0.138321	0.8902
C	0.109991	0.019652	5.596841	0.0000

Lampiran.8 Uji hipotesis

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.155355	0.150338	1.033366	0.3037
X2?	0.047222	0.028816	1.638724	0.1041
X3?	1.232257	0.000679	1814.287	0.0000
X4?	0.031897	0.230600	0.138321	0.8902
C	0.109991	0.019652	5.596841	0.0000

Hasil Uji F (Uji Simultan)

R-squared	0.999967	Mean dependent var	1.054378
Adjusted R-squared	0.999966	S.D. dependent var	14.46567
S.E. of regression	0.084603	Sum squared resid	0.787349
F-statistic	833169.0	Durbin-Watson stat	1.730258
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.999967	Mean dependent var	1.054378
Adjusted R-squared	0.999966	S.D. dependent var	14.46567
S.E. of regression	0.084603	Sum squared resid	0.787349
F-statistic	833169.0	Durbin-Watson stat	1.730258
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran.9 Tabel Distribusi T (81-120)

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Lampiran.10 Tabel Distribusi F (91-135)

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.88	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.88	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.88	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.88	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.88	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.48	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.48	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.48	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.48	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.48	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.48	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.48	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.48	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.48	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.48	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.48	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Firdha Chairama
Nim : 0502162107
Tempat/Tanggal Lahir : Candirejo/ 28 Agustus 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun I Rahayu Desa Ajibaho
Kecamatan Biru-biru

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tamatan SD Swasta Yayasan Pendidikan Islam Delitua, Tahun 2010

Tamatan SMP Negeri 1 Delitua, Tahun 2013

Tamatan SMA Negeri 1 Delitua, Tahun 2016